LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA BIRO KEUANGAN BAGIAN AKUNTANSI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

SHAFIRA NUR IMANINA RAMADHANTI

8335150280



Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2018

LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE.,M.Si.,Ak.,CA.

NIP.196612131993032003

Nama
Ketua Penguji

Dr. Rida Prihatni S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 197604252001122002
Penguji Ahli,

Yunika Murdayanti, S.E., M.Si., M.Ak.
NIP. 197806212008012011
Dosen Pembimbing,

<u>Tri Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA.</u> NIP. 197601072001122001

KATA PENGANTAR

Puji syukur Praktikan panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatanNya sehingga Praktikan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dengan tepat waktu.

Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Penulisan laporan ini didasarkan pada hasil praktik yang telah Praktikan lakukan di Biro Keuangan Bagian Akuntansi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan RI pada Agustus 2018 hingga September 2018.

Selama praktik dan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, banyak sekali pihak-pihak yang memberikan dukungan, arahan, saran, dan bimbingan kepada Praktikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Praktikan ingin mengucapkan terima kasih, kepada:

- 1. Kedua Orang tua dan Keluarga atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan.
- 2. Bapak Prof. Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- 3. Ibu Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si., Ak., CA selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ.
- 4. Ibu Tri Hesti Utaminingtyas, SE, M.SA selaku dosen pembimbing atas arahan dan dukungannya selama proses penulisan laporan PKL.
- Bapak Marta Hardisarwono selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.
- 6. Bapak Joko Murdyono selaku Kepala Bagian Akuntansi Biro Keuangan.

7. Ibu Siti Aluyah selaku Kepala Subbagian Akuntansi Subbagian Transportasi Udara dan Penunjang.

8. Seluruh karyawan Bagian Akuntansi Biro Keuangan yang telah membantu dan membimbing selama pelaksanaan PKL.

 Seluruh teman-teman dan sahabat yang selalu mendorong dan memberikan semangat selama proses PKL dan penyusunan laporan PKL.

Praktikan menyadari masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Oleh karena itu, Praktikan mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan berdampak positif bagi Praktikan dan semua pihak yang membaca laporan ini

Jakarta, November 2018

Praktikan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	. ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	. v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	. 1
A. Latar Belakang PKL	. 1
B. Maksud dan Tujuan PKL	. 3
C. Kegunaan PKL	. 4
D. Tempat PKL	. 5
E. Jadwal Waktu PKL	. 6
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	9
A. Sejarah Perusahaan	. 9
B. Struktur Organisasi	. 15
C. Kegiatan Umum Perusahaan	. 27

BAE	B III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	32
A.	Bidang Kerja	32
B.	Pelaksanaan Kerja	33
C.	Kendala Yang Dihadapi	42
D.	Cara mengatasi Kendala	44
BAE	B IV KESIMPULAN	47
A.	Kesimpulan	47
B.	Saran	48
DA	AFTAR PUSTAKA	50
LA	MPIRAN-LAMPIRAN	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan	52
Lampiran 2: Surat Persetujuan Praktik Kerja Lapangan	. 53
Lampiran 3: Rincian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	54
Lampiran 4: Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan	57
Lampiran 5: Penilaian Praktik Kerja Lapangan	60
Lampiran 6: Surat Keterangan Praktik kerja Lapangan	61
Lampiran 7: Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan	62
Lampiran 8: Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan	63
Lampiran 9: Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian	
Perhubungan	64
Lampiran 10: Struktur Organisasi Biro Keuangan Bagian Akuntansi	65
Lampiran 11: Aplikasi eRekon&LK	66
Lampiran 12: Laporan Keuangan	68
Lampiran 13: Form Telaah Laporan Keuangan	73
Lampiran 14: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belania	78

Lampiran 15: Form Excel Trend Kenaikan dan Penurunan Anggaran RM	
dan BLU pada Satker BLU	81
Lampiran 16: Neraca Percobaan Akrual	86
Lampiran 17: Transaksi Jurnal Penyesuaian	88
Lampiran 18: Prosedur Akuntansi Subsistem Akuntansi Pendapatan Jasa	
BP3 Jayapura	90
Lampiran 19: Prosedur Pendapatan Jasa Layanan dan Pendidikan	94
Lampiran 20: Surat Perbaikan atas Dokumen Usulan PSA BP3 Jayapura	97
Lampiran 21: Nota Dinas Pembahasan PSA BP3 Jayapura	98
Lampiran 22: Kartu Konsultasi Bimbingan	99

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini seiring dengan peningkatan kebutuhan layanan yang cepat dan efisien. Pada suatu perusahaan sangat membutuhkan sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan teknologi untuk produktivitas usaha. Hal ini tentunya menuntut semua individu harus memiliki kompetensi berdaya jual tinggi dan unggul dalam setiap aspek, terutama dalam bidang pekerjaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, naik 2,39 juta orang dibanding Februari 2017. Sejalan dengan itu, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebesar 69,20 persen, meningkat 0,18 persen poin. Hal ini menunjukan bahwa jumlah angkatan kerja yang selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, menimbulkan persaingan yang ketat bagi para pencari kerja khususnya untuk mahasiswa yang baru lulus.

Dalam masa ini seorang mahasiswa bukan hanya dituntut berkompeten dalam bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi seperti mandiri, terampil, disiplin, jujur, mampu berkomunikasi, mampu mengambil keputusan, peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di dunia luar serta memiliki etos kerja yang tinggi terhadap pekerjaan

yang dihadapi. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah program Praktik KerjaLapangan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memperoleh berbagai kompetensi yang dibutuhkan setelah menyelesaikan pendidikan.

Ketika mahasiswa selesai dalam perkuliahan, maka harus ada persiapan dalam memasuki dunia kerja. Selama menempuh pendidikan di Universitas, mahasiswa mendapatkan mata kuliah yang lebih berfokus kepada teori dandalam praktik secara langsung sangat jarang dilakukan. Maka dari itu dibutuhkan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Dengan adanya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL), diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada mahasiswa secara nyata mengenai dunia kerja seperti apa sekaligus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah didapatkan selama kegiatan perkuliahan. Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE UNJ, diwajibkan untuk melaksanakan program ini, karena PKL merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi yang pelaksanaannya dilakukan selama 40 hari kerja.

Praktikan memilih Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan karena salahsatu kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Oleh karena itu, praktikan ingin mengetahui proses bisnis dan penatausahaan dalam pelayanan transportasi yang dilakukan. Selain itu, ingin mengetahui proses penyusunan Laporan Keuangan dalam

Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dan ingin mengetahui bagaimana penerapan Akuntansi Pemerintah yang sudah didapatkan di perkuliahan. Selain itu, memiliki banyak manfaat untuk praktikan sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi. Praktikan ditempatkan pada bagian Akuntansi Biro Keuangan.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Maksud praktik kerja pada kegiatan PKL antara lain:

- Digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa tingkat akhir.
- Menjadikan sarana untuk mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki dalam diri mahasiswa.
- 3. Mempelajari secara langsung penerapan akuntansi dalam dunia kerja.
- 4. Mempelajari pengelolaan keuangan pada Biro Keuangan Bagian Akuntansi.
- 5. Mengenal bidang kerjaan tertentu khususnya kegiatan akuntansi dalam pemeritahan secara nyata.

Tujuan praktik kerja pada kegiatan PKL antara lain:

- Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mengenai kegiatan akuntansi di dalam lembaga pemerintahan.
- Melaksanakan teori dan ilmu yang sudah didapat diperkuliahan kedalam dunia kerja.

- Melatih kemandirian, kedisiplinan dan tanggungjawab dalam menghadapi dunia kerja nantinya.
- 4. Memperoleh informasi mengenai masalah dalam dunia kerja dan cara penyelesaiannya.
- 5. Mengetahui mengenai segala hal dalam dunia kerja, baik dalam pekerjaan maupun kondisi lingkungan pekerjaan.

C. Kegunaan PKL

Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, terdapat kegunaan bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Adapun kegunaan tersebut adalah :

1. Bagi Praktikan

- a. Salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program Strata 1 (S1)
 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- b. Melatih keterampilan yang telah didapatkan selama perkuliahan.
- c. Meningkatkan pengalaman dan pengetahuan dalam dunia kerja.
- d. Melatih tanggung jawab dan displin dalam manajemen waktu pelaksanaan tugas yang diberikan.
- e. Melaksanakan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan.
- f. Sarana menggali informasi-informasi tentang dunia kerja sehingga dapat mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja.
- g. Dapat mengetahui dunia kerja sesungguhnya.

2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi

- a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga dapat menciptakan lulusan yang berkualitas, berkompetensi, dan professional.
- b. Memperoleh umpan balik agar dapat menyempurnakan kurikulum yang ada sesuai dengan kebutuhan dunia kerja serta perkembangan teknologi saat ini.
- c. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan instansi atau perusahaan dalam meningkatkan program praktek kerja lapangan dan juga agar lulusan Universitas Negeri Jakarta dapat diterima dalam dunia kerja.
- d. Mengukur kemampuan mahasiswa yang didapat selama perkuliahan sesuai dengan perkembangan dunia kerja saat ini.

3. Bagi Instansi

- a. Dapat menjalin kerjasama antara pihak Universitas dengan perusahaan yang saling bermanfaat dan menguntungkan.
- b. Sebagai sarana kontribusi terhadap dunia pendidikan.
- Memungkinkan instansi perusahaan untuk merekrut mahasiswa
 Universitas Negeri Jakarta yang berkualitas.
- d. Realisasi dari misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial.

D. Tempat Pelaksanaan PKL

Jenis Lembaga : Instansi Pemerintah

Lokasi : Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan

Jalan Medan Merdeka Barat No. 8. Gedung Karsa

lantai 4. Gambir, Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3811308, 3505006

Fax :(021) 3504631

Web : www.dephub.go.id

Praktikan memilih Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan karena instansi pemerintah yang memiliki banyak manfaat untuk praktikan sebagai mahasiswa jurusan akuntansi. Selain itu, menjadi sarana untuk mengimplementasikan pengetahuan Akuntansi Pemerintah yang telah diperoleh.

E. Jadwal Waktu PKL

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini, pertama praktikan mencari perusahaan yang tepat dan dapat menerima mahasiswa PKL sesuai dengan jurusan akuntansi. Setelah itu, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk melamar ke perusahaan yang akan dituju sebagai tempat melaksanakan kegiatan PKL. Praktikan mengurus segala kebutuhan dan administrasi yang diperlukan untuk melamar ke perusahaan yang ingin dituju. Praktikan mengambil Surat Permohonan Izin PKL dari fakultas dan

7

praktikan mengisi Surat Permohonan Izin tersebut pada tanggal 17 Juli

2018. Surat Permohonan Izin PKL tersebut dibawa ke Biro Administrasi

Akademi Kemahasiswaan (BAAK) untuk diketik dan dilegalisir.

Diperlukan waktu tiga hari untuk pengerjaannya sehingga dapat diambil

kembali pada tanggal 20 Juli 2018. Setelah mendapat surat izin PKL dari

BAAK selanjutnya, praktikan memberikan surat izin tersebut kepada

Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan. Praktikan memperoleh

jawaban dari pihak Subbagian Tata Usaha Biro Keuangan bahwa

praktikan mendapatkan izin untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan

di tempat tersebut.

b. Tahap Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan PKL dilakukan kurang lebih 2 bulan atau

selama 40 hari terhitung sejak 23 juli sampai 19 September 2018.

Praktikan ditempatkan di Bagian Akuntansi Biro Keuangan. Untuk

ketentuan dan peraturan lainnya disesuaikan dengan karyawan biro

keuangan bagian akuntansi lainnya.

Pelaksanaan PKL

: 23 Juli-19 September 2018

Durasi

: 40 hari kerja

Waktu pelaksanaan magang

Hari kerja

: Senin s.d. Jumat

Jam kerja

: Senin s.d. Kamis : 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB

8

Jumat: 07.30 s.d. 16.30 WIB

Jam istirahat

: Senin s.d. Kamis : 12.00 WIB - 13.00 WIB

Jumat: 11.30 WIB - 13.00 WIB

c. Tahap Pelaporan

Pada saat kegiatan PKL selesai, praktikan menyusun laporan

mengenai kegiatan yang dilakukan selama PKL. Praktikan memulai

penyusunan laporan PKL dengan mengumpulkan data berupa berkas-

berkas, informasi perusahaan berdasarkan daftar kegiatan harian yang

dibutuhkan untuk menyusun dan menyempurnakan laporan PKL. Data

tersebut praktikan peroleh dari Biro Keuangan bagian Akuntansi

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan melalui persetujuan dari

pihak tersebut. Pembuatan laporan PKL merupakan salah satu syarat

kelulusan bagi setiap mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan membuat laporan PKL

sesuai dengan buku pedoman PKL dan petunjuk dari dosen pembimbing.

Penyusunan laporan PKL dimulai pada pertengahan Oktober 2018 sampai

dengan laporan PKL selesai disusun.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Perusahaan

1. Waktu berdiri

Kementerian Perhubungan adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Awal mulanya Kementerian Perhubungan bernama Departemen Perhubungan. Perubahan nama tersebut tidak secara signifikan mengubah fungsi dari lembaga itu sendiri. Baik Kementerian Perhubungan maupun Departemen Perhubungan memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai pengatur tata cara berkendara dan berlalu lintas.

Kementerian Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode kabinet Republik Indonesia. Dalam hal ini,awal berdiri kementerian di pimpin oleh seorang menteri yang bernama Abikusno Tjokrosujono dimulai sejak 2 September 1945 s.d 14 November 1945 dalam susunan kabinet presidensil. Selanjutnya terdapat perubahan yaitu digantikan dengan Ir. Abdulkarim pada Kabinet Sjahrir ke I peridoe 14 November 1945 s.d 12 Maret 1946. Kabinet Sjahrir berjalan hingga Kabiner Sjahrir III yang belangsung hingga tahun 1947.Perubahan Menteri kembali

terjadi pada Kabinet Amir Sjarifudin I dan II yaitu Ir. Djuanda untuk periode 1947 hingga 1948.

Pergantian tersebut diiringi dengan perombakan-perombakan kabinet lainnya yang memiliki visi misi yang sama. Pada Kabinet Republik Indonesia Kesatuan ke VI yang berlaku pada 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957, Kementerian Perhubungan memiliki program yang lebih menitikberatkan pada pemenuhan berbagai moda transportasi. Alat-alat transportasi tersebut bagi daerah-daerah, terutama bagi daerah yang berpotensi untuk menghasilkan berbagai bahan-bahan kebutuhan pokok. Dimana programnya ialah melengkapi alat-alat transportasi untuk daerah yang menghasilkan produksi dan memajukan, mengawasi pelayaran nasional serta melindungi terhadap persaingan asing. Dalam peningkatan terus dilakukan agar pesaing yang datang tidak menjadi ancaman bagi alat-alat transportasi yang ada di Indonesia.

Kementerian Perhubungan Indonesia semakin berkembang dengan kebutuhan. Kabinet dan struktur kementerian perhubungan serta nama menteri yang memimpin terus terjadi perubahan selama masa pemerintahan bapak Soeharto (Orde baru) 1968-1998 kementerian dipimpin oleh seorang menteri Pada masa Kabinet Pembangunan IV berlangsung dari 19 Maret 1983 hingga Maret 1988, Kementerian Perhubungan atau Departemen Perhubungan mulai memiliki beberapa direktorat. Pembagian direktorat tersebut dibedakan atas jenis alat

transportasi. yaitu, Direktorat Perhubungan Darat, Direktorat Perhubungan Laut, Direktorat Perhubungan Udara. Pembagian direktorat dalam forum milik pemerintah ini ditujukan buat mempermudah kinerja. Kementerian Perhubungan pun menjadi sebuah forum yang membawahi beberapa direktorat. Direktorat itu sendiri kemudian membawahi beberapa kanwil yang tersebar pada provinsi-provinsi di Indonesia

Selama Indonesia di pimpin oleh Ir. Soekarno sebelum terjadinya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 nama kabinet yang membantu Ir. Soekarno dalam mengurus negara Indonesia sudah 18 kali mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka yang tentunya juga merubah susunan serta nama menteri yang meminpin di kementerian perhubungan. Setelah adanya dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, struktur di kementerian perhubungan terjadi perubahaan yang awalnya di pimpin oleh seorang menteri perhubungan, saat itu di pecah menjadi 3 bagian yaknimenteri muda perhubungan darat dan pos telegrap dan telepon, menteri muda perhubungan laut serta menteri perhubungan udara. Setelah dekrit presiden keluar kabinet Republik Indonesia di namakan kabinet kerja, dari kabinet kerja I sampai kabinet kerja IV yang dimulai dari 10 Juli 1959 s.d 27 Agustus 1964.

Pembagian direktorat dalam lembaga milik pemerintah ini ditujukan untuk mempermudah kinerja. Kementerian Perhubungan pun menjadi sebuah lembaga yang membawahi beberapa direktorat.

Direktorat itu sendiri kemudian membawahi beberapa kanwil yang terbesar di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Sejak reformasi perubahan nama kabinet biasanya mengikuti pergantian presiden, sehingga perubahan menteri di kementerianperhubungan sejak terjadinya reformasi tidak terlalu banyak perubahaan. Pada pemerintahan baru yang di pimpin oleh pak presiden Joko Widodo, dengan kabinetnya bernama kabinet kerja kementerian perhubungan di pimpin oleh sorang menteri yaitu Ignasius Jonan yang mulai bekerja sejak 27 oktober 2014.

a. Visi dan Misi Kementerian Perhubungan RI

Kementerian Perhubungan mempunyai visi dan misi tersendiri dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan agar kemajuan perusahaan lebih terarah dengan benar.

Visi:

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

Misi:

- Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan.
- Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan.

- 3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan.
- 4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah.

2. Lambang dan Logo

Lambang terdiri dari bentuk lingkaran dan pita bertuliskan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menggambarkan satu kesatuan, kekompakan dan keterpaduan dalam melaksanakan tugas yang diemban Kementerian Perhubungan untuk mencapai cita-cita Bangsa dan Negara. Warna biru tua yang melambangkan suasana kedamaian yang terwujud dengan pelayanan jasa angkutan yang dilayani dengan tertib, teratur, cepat, tepat, aman dan nyaman dan warna kuning emas melambangkan kejayaan dan keagungan alam semesta.

Logo Kementerian Perhubungan suatu bentuk simbolis yang menggambarkan keluarga besar Perhubungan. Warna logo terdiri dari warna biru langit berarti kedamaian dan kuning berarti keagungan.Lambang dan Logo dari Kementerian Perhubungan adalah seperti yang terdapat pada Gambar di lampiran 7.

3. Prestasi-prestasi Kementerian Perhubungan

a. Kementerian Perhubungan meraih penghargaan Bhumandala
 Award tahun 2016 dari Badan Informasi Geospasial sebagai
 pemenang Juara Harapan I untuk kategori

- Kementerian/Lembaga karena keberhasilannya mengembangkan simpul jaringan untuk mewujudkan tersedianya informasi geospasial yang handal,mutakhir,valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Kementerian Perhubungan menerima penghargaan pada kategori Informatif dan Responsif dari Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Komunikasi dan Informatika atas keberhasilan dalam menyajikan dan melayani informasi selama angkutan lebaran 2018.
- c. Menteri Perhubungan menerima penghargaan Best Ccommunicators 2018. Penghargaan ini dianggap berhasil mewujudkan reputasi positif kementerian/lembaga/pemerintah daerah/korporasi/organisasi di mata stakeholders dalam mewujudkan program kerja Kemenhub sekaligus mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan pers media dalam menyampaikan hasil pembangunan.
- d. Kementerian Perhubungan menerima penghargaan dari Presiden Republik Indonesia atas keberhasilan Kementerian Perhubungan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2014.
- e. Kementerian Perhubungan meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik dalam mengimplementasikan UU

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada Tahun 2015.

B. Struktur Organisasi dan Fungsi

1. Stuktur Organisasi Kementerian Perhubungan

Struktur organisasi Kementerian Perhubungan memiliki unit kerja dimana dipimpin oleh Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi)yang menjalankan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Perhubungan menjalankan fungsi yaituperumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden. (Lampiran 8)

Dalam menjalankan fungsinya, Menteri Perhubungan dibantu oleh:

a. Sekretariat Jenderal

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1) Koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan.
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan.
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Perhubungan.
- 4) Pembinaan dan penataaan organisasi dan tata laksana.

b. Inspektorat Jenderal

Melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian
 Perhubungan.
- 3) Penyiapan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur pengawasandi bidang perhubungan.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Daratmenyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan

kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, perkerataapian serta transportasi perkotaan.

d. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan laut. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, serta penjagaan dan penyelamatan.

e. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan udara. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan

f. Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian

menyelenggarakan fungsi Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api.

g. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan.

h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSDMP menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorologi dan geofisika.
- 2) Perumusan program dan pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan

awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorologi dan geofisika.

i. Staf Ahli Menteri yang memiliki berbagai bidang diantaranya: Bidang Lingkungan Perhubungan, Teknologi dan Energi, Regulasi dan Keselamatan, Multimoda dan Kesisteman, serta Ekonomi dan Kemitraan. Dalam Lingkungan Kementerian Perhubungan memiliki banyak satker (satuan kerja) kurang lebih ratusan di Seluruh Indonesia dalam Sektor Udara, Darat dan Perkeretapian, dan Laut.

2. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal

Dalam Sekretariat Jenderal menjalankan tugas untuk melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Sekretariat Jenderal Djoko Sasono Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh unit kerja: (Lampiran 9)

a. Biro Perencanaan

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi Penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian

kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir (rolling plan), serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

b. Biro Kepegawaian dan Organisasi

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata administrasi reformasi laksana. serta birokrasi lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengendalian perencanaan dan pengembangan kepegawaian.

c. Biro Keuangan

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

 Penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan / rencana, pemantauan, penelitian, evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

2) Penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan, serta penyiapan pembinaan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan.

d. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.
- Penyiapan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di bidang transportasi.

e. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi monitoring perencanaan, dan evaluasi, pelaporan, penyiapan pembinaan penyelenggaraan, pengawasan pengadaan Barang/ Jasa, pemilihan Mitra bidang transportasi Darat, Udara dan Perkeretaapian, serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

f. Biro Umum

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumahtanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri,
 Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf

Khusus, serta pembinaan dan penyelenggaraan keprotokolan.

 Pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan Kementerian Perhubungan, pelaporan, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

g. Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi publik. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan perumusan rencana strategi dan evaluasi program komunikasi dan informasi publik.
- Penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui pemanfaatan media massa, media sosial, jejaring komunikasi, dan pengelolaan opini publik.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat Jenderal didukung oleh 3 (tiga) Pusat sebagai unsur penunjang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal. Unsur penunjang pada unit kerja Sekretariat Jenderal terdiri dari:

- a. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan
- b. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan
- c. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional.

Selain itu, terdapat juga 2 (dua) unsur penunjang lainnya yang secara administratif struktural berada di bawah pembinaan Sekretaris Jenderal, namun dalam tugas memberikan masukan langsung kepada Menteri Perhubungan yaitu:

- a. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
- b. Mahkamah Pelayaran

3. Struktur Organisasi Biro Keuangan bagian Akuntansi

Dalam Biro Keuangandipimpin oleh Kepala Biro Keuangan yaitu Marta Hardisarwono. Dalam menjalankan tugas administrasi pengelolaan keuangan, Biro Keuangan memiliki 4 bagian yaitu:

a. Bagian Pelaksana Anggaran

Bagian pelaksanaan Anggaran mempunyai melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, revisi rencana anggaran pendapatan dan belanja, pemantauan, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pertimbangan teknis penyusunan petunjuk pelaksanaan atau operasional anggaran pendapatan dan belanja.

b. Bagian Akuntansi

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan verifikasi dan urusan pembukuan, serta penyusunan bahan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (LRA) dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan verifikasi dokumen dan penilaian realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 2) Penyiapan pembukuan, penyusunan perhitungan dan pelaporan serta pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan untuk anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

c. Bagian Perbendaharaan

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Dalam melaksanakan tugas, bagian perbendaharaan menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan pembinaan dan penatausahaan keuangan, penyiapan bahan penetapan pengelola anggaran, serta pemantauan laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan.

d. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Bagian PNBP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dimana penerimaan tersebut berseumber dari pengelolaan dana pemerintah.

Pada Bagian Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bagian Akuntansi yaitu Joko Murdyono. Terdapat 3 Subbagian Akuntansi yang dipimpin oleh: (Lampiran 10)

- a. Kepala Subbagian Akuntansi Transportasi Darat dan Perkeretaapian.
- b. Kepala Subbagian Akuntansi Transportasi Laut.
- c. Kepala Subbagian Akuntansi Udara dan Penunjang.

C. Kegiatan Umum Perusahaan

1. Kementerian Perhubungan

a. Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Darat

Pembangunan transportasi darat telah diarahkan pada pengembangan keterpaduan transportasi jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan, di seluruh wilayah tanah air melalui pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan manajemen dan pelayanan, aspek keselamatan yang meliputi aspek rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan serta publikasi termasuk pembinaan disiplin pemakai jalan, penanggulangan muatan lebih dan kejelasan informasi lalu-lintas angkutan jalan. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat meliputi Pembangunan Kapal Penyeberangan, Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat meliputi Pembangunan Terminal, Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Baru, Pembangunan Pelabuhan Danau Baru, serta Pembangunan Pelabuhan Sungai Baru. Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat meliputi Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan, Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

B. Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Transportasi Perkeretapian

Mengembangkan jaringan transportasi kapasitas tinggi untuk angkutan penumpang dan barang, khususnya untuk produk komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, berbiaya murah, dengan energi yang rendah. Pembangunan dan Pengelolaannya meliputi, Kegiatan subsidi angkutan KA perintis dan subsidi angkutan motor dengan KA. Penyelenggaraan angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Peningkatan jalur KA, Pengadaan material rel, Peningkatan dan pembangunan jembatan/ terowongan/ underpass / flyover, Peningkatan dan pembangunan listrik aliran atas, Pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian,Perawatan pengoperasian prasarana KA milik negara, Pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian, Pengadaan dan pemeliharaan peralatan keselamatan dan SDM perkeretaapian, Belanja pegawai, belanja operasional, serta dukungan manajemen teknis pada Ditjen Perkeretaapian.

c. Rencana Pembangunan Transportasi Laut

Pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas Angkutan Laut meliputi Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Laut Barang,Kegiatan Subsidi Penumpang Perintis,Lanjutan Pembangunan Kapal Penumpang,Perintis, dan Barang seperti kapal kontainer,kapal perintis serta penyelenggaraan angkutan lebaran. Pengelolaan dan penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kepelabuhan berupa Pembangunan/Rehabilitasi Fasilitas Utama Pelabuhan, Fasilitas Penunjang Pelabuhan Laut,

d. Rencana Pembangunan Transportasi Udara

Pembangunan dan Pengelolaan bidang Bandar Udara untuk peningkatan kapasitas pesawat,pembangunan Bandar Udara baru, pengembangan Bandara di wilayah perbatasan. Dalam bidang keamanan penerbangan lanjutan pembangunan dan penyediaan fasilitas keselamatan penerbangan, yang terdiri dari pengadaan fasilitas keamanan penerbangan dan pengadaan fasilitas pendaratan visual.

2. Sekretariat Jenderal Biro Keuangan

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal diperlukan anggaran dalam mendanai rencana pembangunan transportasi tersebut. Selain itu, untuk kegiatan operasional Kementerian Perhubungan juga dibutuhkan anggaran. Dalam hal ini, untuk melaksanakan tugas penyiapan dan penyusunan anggaran dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Biro Keuangan. Kegiatan umum yang dilakukan ada beberapa tahap yang dilakukan. Untuk tahap pertama yaitu tahap permintaan dimana masing-masing bagian Biro Keuangan membuat perencanaan anggaran barang dan modal yang mengacu pada anggaran

tahun sebelumnya dan menyesuaikan kebutuhan. Setelah itu perencanaan anggaran tersebut diserahkan kepada satker untuk dicek kebenarannya dan disusun. Kemudian satker mengajukan perencanaan anggaran tersebut kepada Biro Perencanaan. Untuk mengajukan perencanaan tersebut melalui rapat, dalam rapat tersebut diperoleh hasil berupa persetujuan perencanaan anggaran. Hasil persetujuan tersebut kemudian akan diajukan kepada Kementerian Keuangan agar dapat memperoleh DIPA untuk pihak Kementerian Perhubungan. DIPA merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran didalamnya terdapat poin-poin mengenai anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Tahap kedua dalam tahap pelaksanaan yaitu perencanaan anggaran yang telah disetuji dapat direalisasikan pada masing-masing bagian Biro Keuangan misalnya berupa kegiatan perjalanan dinas, pembelian Alat Tulis Kantor, gaji pegawai dan lain-lain. Untuk memenuhi anggaran tersebut, dapat menggunakan Uang Persediaan yang dimiliki Biro keuangan. Selanjutnya masing-masing bagian dapat diajukan kepada bagian perbendaharaan.

Tahap terakhir ialah tahap pertanggungjawaban. Pada tahap ini, masing-masing bagian pada Biro Keuangan harus membuat laporan pertanggungjawaban disertai bukti-bukti transaksi atas seluruh kegiatan dan pembelian yang dilakukan. Melalui data tersebut, satker akan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP),Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTB), dan Alat Data

Komunikasi SPM (ADK SPM). Data yang sudah dibuat kemudian akan diajukan ke KPPN. Akan tetapi, data yang diajukan hanya SPM dan ADK SPM. Setelah diajukan, KPPN akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D dibagi kedalam dua jenis, yaitu Langsung dan Ganti Uang Persediaan (GUP). Pada SP2D Langsung, Kementerian Perhubungan tidak akan melakukan pembayaran secara langsung. Pembayaran akan dilakukan secara langsung oleh KPPN kepada pihak yang bersangkutan disertai dengan bukti pembelian. Sedangkan pada SP2D GUP (Ganti Uang Persediaan), pembayaran akan dilakukan oleh KPPN dalam bentuk penggantian uang persediaan. Penggantian Uang Pesediaan (UP) tersebut dapat dilakukan apabila uang persediaan yang digunakan sudah mencapai angka lebih dari 50% dari nilai tetap uang persediaan.

Setelah dikeluarkannya SP2D oleh KPPN, uang akan diturunkan ke Bank Persepsi KPPN dari Bank Kementerian. Selanjutnya uang tersebut akan masuk ke Bendahara Umum Negara (BUN). Dari Bendahara Umum Negara (BUN), uang akan diturunkan pada bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekertariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Perhubungan yang merupakan Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi dan ditempatkan pada Sekretariat Jenderal Biro Keuangan Bagian Akuntansi. Praktikan melaksanakan PKL terhitung mulai dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan 19 September 2018. Selama pelaksanaan PKL ini, praktikan di bimbing oleh Kepala Subbagian Akuntansi Transportasi Udara dan Penunjang dan karyawan pada Bagian Akuntansi (penyusun laporan keuangan) untuk membantu beberapa tugas pada bagian tersebut untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Dari beberapa pekerjaan yang diberikan kepada praktikan, secara garis besar, *jobdesk* yang praktikan lakukan adalah:

- 1. Melakukan Rekonsiliasi Data pada aplikasi E-rekon&LK
- 2. Melakukan telaah per Komponen Laporan Keuangan
- Membuat Trend Kenaikan dan Penurunan Belanja (Anggaran (RM) dan BLU) pada satker BLU tahun 2016-2018
- Memverifikasi neraca percobaan pada Laporan Keuangan tingkat Unit Eselon 1

 Membantu memeriksa Pedoman Sistem Akuntansi Balai Pendidikan dan Penerbangan Jayapura

B. Pelaksanaan Kerja

Ketika melaksanakan PKL pada hari pertama, praktikan ditemani dengan Kepala Subbagian Akuntansi Transportasi Udara dan Penunjang Bu Siti Aluyah memperkenalkan diri kepada seluruh pegawai bagian Akuntansi. Hal tersebut dilakukan agar ketika para pegawai membutuhkan bantuan praktikan akan lebih mudah untuk memulai pekerjaan.

Setelah berkenalan dengan seluruh pegawai Biro Keuangan bagian Akuntansi, praktikan diberikan arahan dan penjelasan seputar pekerjaan yang dilakukan pada bagian tersebut. Selain itu praktikan mempelajari bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dari bagian Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 225 /PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat agar mengetahui Penerapan SAP sehingga dalam mengerjakan tugas yang diberikan dapat dilakukan. Adapun perincian tugas yang dilakukan oleh praktikan selama menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL):

1. Melakukan Rekonsiliasi Data pada aplikasi E-rekon&LK

Dalam hal ini SATKER (Satuan Kerja) BLU mengupload data yang digunakan sebagai dokumen sumber dalam proses

penyusunan Laporan Keuangan. Dimana pada aplikasi Erekon&LK transaksi dalam Konfirmasi tersebut terdapat data SAI yaitu dari SATKER(Satuan Kerja) dan SIAP dari KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). E-Rekon&LK merupakan sistem berbasis *web* yang berfungsi sebagai *tools* pelaksanaan Rekonsiliasi, penyusunan Laporan Keuangan, serta penyatuan data LKKL

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/PMK.05/2016, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Tujuannya adalah meyakinkan keandalan data dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Langkah-langkah merekonsiliasi data adalah sebagai berikut:

- a. Buka aplikasi E-Rekon pada web (**e**-rekon-lk.djpbn.kemenkeu.go.id/).(Lampiran 11)
- b. Pilih menu *Monitoring* Keuangan, klik Transaksi dalam Konfirmasi (selisih antara pencatatan yang dilakukan oleh SIAP dengan yang dilakukan oleh SAI).
- c. Praktikan mencocokan saldo dari SATKER yaitu SAI dengan data KPPN yaitu SIAP apakah terdapat perbedaan.

- d. Jika terdapat perbedaan, maka Unit Eselon 1 akan memberitahu kepada SATKER untuk memperbaikinya dan sesuaikan dengan data KPPN.
- e. Setelah semuanya tidak terdapat perbedaan nominal atau balance maka status BAR siap di download. (Lanjutan Lampiran 11)

2. Melakukan telaah per Komponen Laporan Keuangan

Telaah adalah suatu kegiatan memeriksa Laporan Keuangan oleh penyusun Laporan Keuangan untuk meyakini keandalan Laporan Keuangan yang disusunnya. Langkahlangkah dalam melakukan telaah adalah:

- a. Buka form kertas kerja telaah laporan keuangan pada microsoft excel. (Lampiran 13)
- Sebelum melakukan telaah, hal yang perlu diperhatikan ialah kelengkapan laporan keuangan (Lampiran 12)
- c. Selanjutnya diperiksa kesesuaian dengan persamaan dasar akuntansi yaitu harus balance Total Aset = Kewajiban + Ekuitas.(Lanjutan Lampiran 13)
- d. Pada neraca percobaan akrual, pengecekan saldo tidak normal pastikan tidak terdapat akun null. Kemudian pengecekan posisi saldo (Debit/Kredit) untuk akun Aset (D), Penyisihan Piutang (K), Akumulasi Penyusutan (K), Kewajiban (K), Pendapatan (K), Pengembalian Pendapatan

(D), Belanja/Beban (D) dan seluruh akun Pengembalian Belanja (K).

Pengecekan akun-akun yang tidak boleh ada: Akun Ekuitas Transaksi Lainnya,Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Bunga Lainnya, Penerimaan kembali belanja pembayaran Kewajiban Utang TAYL, Penerimaan kembali belanja Subsidi TAYL, Hibah TAYL, belanja lain-lain TAYL, dan Pendapatan anggaran lain-lain. (Lanjutan Lampiran 13)

- e. Pada Laporan Operasional pastikan tidak ada akun Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Hibah,Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Transfer, Beban Lainlain. Kemudian pengecekan saldo adakah akun null atau tidak ada uraiannya dan pengecekan saldo normal yaitu seluruh akun di LO bernilai positif dan seluruh akun beban penyisihan piutang bernilai positif. (Lanjutan Lampiran 13)
- f. Pada Laporan Perubahan Ekuitas, dilakukan pengecekan akun tertentu seperti pos "Penyesuaian Nilai Aset", seharusnya tidak ada, jika ada kemungkinan besar belum update serta pengecekan untuk akun selisih revaluasi aset tetap. (Lanjutan Lampiran 13)
- g. Pada Laporan Neraca, dilakukan pengecekan Pos Neraca berupa Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN. (Lanjutan Lampiran 13)

- h. Pada Laporan Realisasi Anggaran, dipastikan agar tidaK
 ada saldo negatif termasuk akun gaji. Lalu pastikan tidak
 ada uraian jenis belanja dalam laporan tersebut. (Lanjutan
 Lampiran 13)
- Jika terdapat ketidaksesuaian dalam proses telaah seperti yang mana seharusnya, maka pihak bagian akuntansi akan mengkonfirmasi langsung kepada pihak satker.

3. Membuat Trend Kenaikan dan Penurunan Belanja (Anggaran RM dan BLU) pada satker BLU tahun 20162018

Dalam hal ini, untuk mengetahui PAGU APBN dan BLU apakah terjadi kenaikan dan penurunan realisasi Belanja RM dan BLU. Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/pembiayaan anggaran dalam APBN. Kode 51 untuk belanja gaji, kode 52 untuk belanja barang, dan kode 53 untuk belanja modal. Langkah-langkah untuk membuatnya adalah:

- a. Pertama, praktikan merekaptulasi anggaran RM dan BLU berdasarkan data dari excel yang terdiri dari kolom PAGU APBN dan BLU serta Realisasi Anggaran (RM) dan BLU. (Lampiran 15)
- b. Selanjutnya praktikan mengambil data tersebut dari satu persatu satker berupa realisasi Anggaran Belanja (RM)

- 51,52,53 dan Belanja (BLU) beserta totalnya untuk membuatrekaptulasiperbandingan antara Anggaran RM dengan BLU Tahun 2016-2018.
- c. Kemudian, praktikan membuat kolom baru. Kolom tersebut berisi realisasi Belanja (RM) dan BLU beserta totalnya.
 Angka tersebut diperoleh dari data excel yang terdapat pada lampiran 15.
- d. Setelah itu, membuat tabel tambahan yaitu realisasi
 Pendapatan yang diperoleh dari Laporan LRA. (Lampiran 14)
- e. Langkah terakhir untuk mengetahui kenaikan/penurunannya, selanjutnya dibuatlah grafik per satker BLU dari data-data seperti yang sudah dijelaskan diatas. (Lanjutan Lampiran 15)

4. Memverifikasi neraca percobaan pada Laporan Keuangan tingkat Unit Eselon 1

Dalam hal ini, praktikan melakukan verifikasi dengan melihat neraca percobaan. Neraca percobaan adalah suatu yang berisi perkiraan-perkiraan buku besar serta penjumlahan debit dan kredit perkiraan tersebut. Tujuan adanya neraca percobaan adalah untuk mengetahui keseimbangan antara jumlah debit dengan jumlah kredit pada buku besar. Apabila tidak seimbang

antara jumlah debit dengan jumlah kredit maka buku besar tersebut salah.

Menurut PMK No. 225//PMK.05/2016, Penyisihan Piutang merupakan Aset berupa piutang di neraca disajikan dengan mencatat nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan menganalisis kualitas tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung sesuai tarif kualitas piutangnya yang diatur dalam ketentuan mengenai penyisihan piutang tak tertagih. Langkah-langkah untuk melakukannya adalah sebagai berikut:

- a. Praktikan melihat pada neraca percobaan akrual dan mengecek ketidaksesuaian saldo. (Lampiran 16)
- Setelah dicek, Praktikan menemukan adanya piutang yang belum disisihkan oleh satuan kerja.
- c. Setelah ditemukan ada ketidaksesuaian maka praktikan melakukan jurnal penyesuaian untuk membentuk beban penyisihan dan penyisihan piutang agar akun tersebut balance.
- d. Praktikan membuka aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual), login dengan ussername dan password. (Lampiran 17)

- e. Praktikan masuk melalui menu transaksi, lalu jurnal penyesuaian. (Lampiran 17)
- f. Masukan kode transaksi, jenis/kategori, dan akun yaitu Beban Penyisihan Piutang PNBPpada Debit dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBP.
- g. Selanjutnya posting dan melakukan pengecekan pada

 Neraca untuk akun Penyisihan Piutang Tidak

 Tertagih(minus).

Membantu memeriksa Pedoman Sistem Akuntansi Balai Pendidikan dan Penerbangan Jayapura

Menurut Warren Reeve,Fees (2005:234), Sistem Akuntansi merupakan metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi kegiatan bisnis (operasional) dan keuangan sebuah perusahaan. Dalam hal ini, memeriksa sistem akuntansi dari satuan kerja merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan. Dimana pada bagian akuntansi ini menjadi pembimbing bagi satker dalam menerapkan pedoman sistem akuntansi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Satker memberikan pedoman sistem akuntansi dalam bentuk docx pada bagian akuntansi untuk diperiksa.
 (Lampiran 18)
- b. Kemudian membuka dokumen tersebut dalam bentuk word.

- c. Hal yang perlu dikoreksi terkait, Prosedur akuntansi (Prosedur Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Pelatihan). Alur penjelasan yang diuraikanharus sesuai dengan flowchart yang dibuat. ketika praktikan menemukan ada ketidaksesuaian langkah selanjutnya ialah membuat pembenarannya dengan memberi tanda bahwa terdapat kesalahan sesuai dengan Sistem Informasi Akuntansi yang telah dipelajari praktikan dan dengan memberi tanda bahwa terdapat kesalahan. (Lampiran 19)
- d. Setelah diperiksa maka diadakan rapat untuk membahas hal tersebut yang dihadiri oleh biro keuangan bagian akuntansi dengan pihak Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura untuk ditindak lanjut/diperbaiki.
- e. Setelah dilakukan revisi oleh BP3 Jayapura lalu mengirim surat balasan atas koreksi PSA tersebut, kemudian pegawai bagian akuntansi mengecek kembali untuk memastikan apakah yang direvisi sudah sesuai. (Lampiran 20)
- f. Setelah sistem akuntansi BP3 Jayapura tidak ada kesalahan lagi dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku maka dibuatkan nota dinas kepada Biro Hukum untuk dapat diproses lebih lanjut. (Lampiran 21)

Pelaksanaan kerja berdasarkan log harian PKL dapat dilihat pada (lampiran 3).

C. Kendala yang Dihadapi

Selama menjalani PKL, Praktikan mendapatkan banyak hal termasuk kendala yang dialami. Kendala tersebut menjadi masalah praktikan sehingga menghambat dalam penyelesaiaan pekerjaan. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman mengenai sistem aplikasi SAIBA

Praktikan diharuskan untuk mengetahui sistem SAIBA untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Pada awalnya praktikan hanya diberi file yang berisi pedoman bagaimana cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Untuk itu praktikan perlu membutuhkan beberapa hari untuk memahaminya. Dan kurangnya penjelasan bagaimana menggunakan SAIBA oleh karyawan pada bagian akuntansi.

2. Belum adanya buku panduan atau prosedur kerja

Dalam hal ini, dengan tidak adanya Standar Operation Procedure (SOP) tertulisuntuk praktikan pada Sub Bagian Akuntansi. Oleh karena itu, dengan belum adanya SOP ini membuat praktikan tidak mengetahui apa saja yang harus dilakukan serta jadwal yang harus diselesaikan.

3. Melakukan proses rekonsiliasi data

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, sistem yang digunakan yaitu berbasis aplikasi e-Rekon&LK dimana untuk mengaksesnya membutuhkan koneksi internet. Namun sewaktu-waktu tidak bisa

membuka aplikasi tersebut karena jaringan internet yang tidak memadai sehingga pengerjaannya menjadi terhambat, tidak efektif dan efisien. Karena dalam aplikasi e-Rekon&LK inilah satker mengupload datanya untuk selanjutnya menjadi data yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Kelengkapan dokumen pendukung Laporan Keuangan seringkali tidak memadai, sehingga perbaikan atas data memakan waktu yang lama. Selain itu, Terkadang satker dalam mengupload data terjadi masalah diantaranya jaringan yang tidak stabil ataupun sistem yang eror seringkali terjadi. Ketika sistem eror tetapi sudah deadline untuk mengupload data maka hal tersebut menjadi kendala bagi satker.

4. Melakukan Telaah pada Laporan Keuangan

Ketika satker mengirim laporan keuangan maka harus dilakukan telaah, dimana terdapat kendala yaitu kurang teliti dalam melaksanakan. Terkadang ada poin yang terlewat dikarenakan banyaknya aspek yang perlu diperhatikan dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, praktikan masih banyak bertanya ketika melakukan telaah, dimana terdapat banyak akun yang tidak boleh ada dalam aturannya.

Membuat Trend Kenaikan dan Penurunan Belanja (Anggaran RM dan BLU)

Merekaptulasi trend Kenaikan dan Penurunan Belanja yang dibuat berdasarkan tahun 2016-2018 dari beberapa satker. Untuk itu diperlukan ketelitian berdasarkan data yang digunakan seperti Laporan Realiasi Anggaran berdasarkan akun Belanja dan Pendapatan. Praktikan dalam memasukkan datanya terkadang tidak sesuai dengan data sehingga hasilnya tidak maksimal dimana yang seharusnya terjadi kenaikan tetapi hasilnya menjadi penurunan.

6. Memeriksa Pedoman Sistem Akuntansi Satker BLU

Dikarenakan Pedoman tersebut penjelasannya kompleks dan tebal maka praktikan hanya memeriksa yang diketahuinya saja misalnya Sistem Informasi Akuntansi yang didalamnya terdapat flowchart sesuai alurnya. Terdapat hal-hal yang belum diketahui, misalnya dalam bagan akun standar yang digunakan dalam satker tersebut apa saja.

D. Cara Mengatasi Kendala

Dengan adanya kendala yang dihadapi praktikan, praktikan terus berupaya untuk terus meminimalisir kesalahan agar kendala tersebut tidak terjadi berulang-ulang. Karena diperlukan usaha untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Berikut upaya yang dilakukan oleh praktikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi:

1. Kurangnya pemahaman mengenai sistem aplikasi SAIBA

Pada saat awal penggunaan Aplikasi SAIBA praktikan masih bingung terhadap pengisian yang harus diinput dan banyak konten-konten yang harus dimasukkan untuk melengkapi data. Akan tetapi, praktikan belajar dari berbagai kesalahan dan banyak bertanya ketika ada yang tidak dimengerti. Pada akhirnya praktikan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan benar.

2. Belum adanya buku panduan atau prosedur kerja

Dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan diperlukan adanya prosedur kerja untuk itu pada bagian akuntansi perlu dibuat agar dapat mengetahui deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan sehingga terhindar dari kesalahan kerja yang nantinya akan berdampak pada perusahaan (instansi pemerintah). Oleh karena itu dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Kerja di perusahaan (instansi pemerintah) dapat membuat pekerjaan praktikan menjadi terfokus dan terarah

3. Melakukan proses rekonsiliasi data

Perusahaan harus menjamin dan menyediakan fasilitasfasilitas yang menunjang agar keberhasilan dalam bekerja dapat dicapai. Perlu penambahan koneksi internet yang memadai agar dapat memudahkan penyelesaian pekerjaan. Jika hal tersebut tidak diperbaiki maka akan menimbulkan keterlambatan dalam menginput dan mengeluarkan output data perusahaan. Selain itu, Meningkatkan pengendalian terhadap Satker untuk mentaati pengaturan waktu upload dan memastikan data yang diupload adalah data yang benar.

4. Melakukan Telaah pada Laporan Keuangan

Praktikan dalam hal ini, perlu memahami proses telaah dengan membaca aturan yang berlaku yaitu mempelajari dari materi dalam power point yang diberikan oleh Kepala Subbagian Akuntansi. Jika tidak ada yang dimengerti, bisa ditanyakan langsung kepada karyawan.

Membuat Trend Kenaikan dan Penurunan Belanja (Anggaran RM dan BLU)

Praktikan ketika membuat ini, perlu meningkatkan ketelitian dan fokus dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan sehingga kesalahan yang terjadi tidak berulang dilain waktu.

6. Memeriksa Pedoman Sistem Akuntansi Satker BLU

Dikarenakan Pedoman Sistem Akuntansi yang kompleks didalamnya, praktikan perlu pemahaman lebih lanjut mengenai hal tersebut. Caranya dapat dengan mempelajari sistem yang berlaku ataupun bertanya pada karyawan untuk mengetahui cara yang seharusnya yang benar dan tepat dalam memeriksa PSA tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan menjadi sarana dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapat di perkuliahan dan melaksanakannya dalam dunia kerja. Dalam pelaksanaan PKL di Biro Keuangan bagian Akuntansi, praktikan memperoleh banyak pengalaman dan ilmu Pengetahuan. Selain itu mengetahui dalam penyesuaian diri dengan lingkungan kerja yang sesungguhnya. Dengan adanya PKL, praktikan dituntut agar dapat lebih mandiri, cepat dan memahami dalam kerja yang dilakukan, displin waktu, dapat bekerja dengan tim, dan bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan.

Beberapa hal yang berguna bagi Praktikan setelah melakukan PKL pada Biro Keuangan Bagian Akuntansi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan yaitu :

- Praktikan dapat mengerjakan rekonsiliasi data dengan aplikasi e-Rekon&LK.
- 2. Praktikan dapat mengerjakan telaah laporan keuangan.
- Praktikan mengetahui cara rekaptulasi perbandingan anggaran APBN(RM) dan BLU.
- 4. Praktikan mengetahui cara verifikasi Laporan Keuangan.

 Praktikan mengetahui cara memeriksa Pedoman Sistem Akuntansi Satuan Kerja mengenai prosedur Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Pelatihan.

B. Saran

Dari Pelaksanaan PKL yang telah dijalani, ada beberapa saran yang harus diperhatikan:

- 1. Bagi Praktikan yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan
 - a. Bagi praktikan selanjutnya, ketika ingin melaksanakan PKL maka harus menemukan tempat PKL sesuai dengan jurusan yang diambil agar sesuai dengan ilmu yang telah didapatkan.
 - b. Mempersiapkan diri sebelum melaksanakan PKL seperti dalam urusan administratif.
 - c. Melaksanakan tugas yang diberikan harus bertanggung jawab dan tepat waktu.
- 2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
 - a. Bagi Fakultas Ekonomi, diharapkan diadakannya pelatihan sebelum melaksanakan PKL agar praktikan mengerti dan siap mengenai hal-hal yang akan dikerjakan ketika melaksanakan PKL nantinya.
 - Meningkatkan kualitas pelayanan akademik dalam menunjang kebutuhan persiapan PKL mahasiswa terkait administrasi, informasi dan prosedur dalam menjalankannya.

3. Bagi Perusahaan

Bagi pihak perusahaan khususnya di Biro Keuangan bagian Akuntansi diharapkan dapat memberikan praktik secara keseluruhan mengenai sistem yang digunakan dalam melaksanakan tugas dan dapat memberikan bimbingan yang lebih mendalam agar mengetahui prosesnya satu per satu sampai dengan hasil outputnya.

DAFTAR PUSTAKA

- FE-UNJ. *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012.
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi Achmad. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: In Media, 2016.
- Kementerian Perhubungan. Sejarah Kementerian Perhubungan.

www.dephub.go.id. (Diakses tanggal 26 November 2018).

- Kementerian Perhubungan. www.dephub.go.id. (Diakses tanggal 10 November 2018).
- Biro Keuangan bagian Akuntansi. www.sik.dephub.go.id. (Diakses tanggal 10 November 2018).
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah

 Pusat. 2016. https://jdih.kemenkeu.go.id. (Diakses tanggal 10 November 2018).
- Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). 2018. http://www.bps.go.id. (Diakses tanggal 20 Oktober 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982 BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180

Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486 Laman : www.unj.ac.id

nders

Nomor : 1753/UN39.12/KM/2018

17 Juli 2018

Lamp. Hal

ē.

:-

: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

Yth. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Gd. Cipta Lt.4 Jl. Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri

Nama

Shafira Nur Imanina Ramadhanti

Nomor Registrasi

8335150280 Akuntansi

Program Studi Fakultas

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

No. Telp/HP

081288379104

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 23 Juli s.d. 20 September 2018 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat

> moyo, SH 30403 198510 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Ekonomi

2. Koordinator Prodi Akuntansi

Lampiran 2: Surat Persetujuan Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP. : (021) 3811308, 3505006 JAKARTA 10110 | FAX : (021) 3522338

TLX :46116 Menhub 1A email:pusdatin@dephub.go.id

FAX : (021) 3522338 SMS center : +62.813-111111-05

home page : www.dephub.go.id

529-A/11/8.11/07/2018

Jakarta, 23 Juli 2018

Klasifikasi Lampiran

Perihal

Segera

Tanggapan atas Permohonan Izin

Praktek Kerja Lapangan

Kepada

Kepala Biro

Akademik, Kemahasiswaan, dan

Humas

Universitas Negeri Jakarta

JAKARTA

- 1. Menunjuk surat Saudara nomor: 1753/UN39.12/KM/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL), bersama ini disampaikan bahwa permohonan izin Praktek Kerja Lapangan mahasiswa a.n. Shafira Nur Imanina Ramadhanti dapat kami setujui dan realisasi pelaksanaannya mulai tanggal 23 Juli s.d. 20 September 2018.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, biaya transportasi dan akomodasi yang timbul dalam pelaksanaan PKL mahasiswa dimaksud menjadi tanggung jawab pemohon.
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO KEUANGAN

MARTA HARDISARWONO Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640307 199003 1 002

"Keselamatan dan Keamanan Transportasi Merupakan Tujuan Bersama"

Lampiran 3: Rincian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan





FAKULTAS EKONOMI

as Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285 Laman: www.fe.unj.ac.id

DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN SKS

: Shafira Nur Imanina Ramadhanti 8335150280

Nama No. Registrasi

Program Studi Tempat Praktik

: S1 Akuntansi

Tempat Praktik : Biro Keuangan Bagian Akuntansi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Alamat Praktik/Telp : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta Pusat

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Pembimbing
1	Senin, 23 Juli 2018	Perkenalan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenhub	Bu Siti
2	Selasa, 24 Juli 2018	Menyamakan data Laporan Neraca dari per Eselon 1 berdasarkan pos-pos Neraca yang telah disusun	Bu Siti
3	Rabu, 25 Juli 2018	Mempelajari Format Laporan Keuangan Di Lingkungan Kemenhub	Bu Siti
4	Kamis, 26 Juli 2018	Membuat Resume Hasil Monitoring dan Evaluasi Bidang Layanan Pendidikan di Lingkungan Kemenhub tahun 2017	Mas Ari
5	Jumat, 27 Juli 2018	Mencocokan data Daftar Rekening Bendahara Penerimaan,Pengeluaran,dan lainnya di Lingkungan Kementerian Perhubungan dengan data Klarifikasi Selisih Hasil Rekonsiliasi Rekening Kemenhub TW 1 2018	Pak Gunawan
6	Senin, 30 Juli 2018	Memeriksa Sistem Akuntansi Balai Kesehatan Penerbangan	Mas Dewa
7	Selasa, 31 Juli 2018	Membantu membuat aturan PM SPI dari outline berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan	Mba Debby
8	Rabu, 1 Agustus 2018	Membuat Aturan KSO berdasarkan outline No.78/PMK.06/2014 tentang Pemanfaatan Barang milik Negara	Mas Dewa
9	Kamis, 2 Agustus 2018	Membuat outline peraturan No. 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada BLU	Mas Dewa
10	Jumat, 3 Agustus 2018	Membuat Aturan KSO berdasarkan outline 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset pada BLU	Mas Dewa
11	Senin, 6 Agustus 2018	Membuat Aturan KSO berdasarkan outline per 13/MBU/09/2014 tentang Pendayagunaan Aset Tetap BUMN	Mas Dewa
12	Selasa, 7 Agustus 2018	Membuat rekapan perbandingan anggaran APBN (RM) dan PNBP (BLU)	Bu Siti
13	Rabu, 8 Agustus 2018	Membuat grafik tren BLU dari Total Realisasi Belanja (RM) dan BLU 2016-2018	Bu Siti
14	Kamis, 9 Agustus 2018	Membuat grafik komposisi Realisasi Belanja 52 APBN (RM) dan BLU per Satker terhadap Total Realisasi Belanja pada 2016-2017	Bu Siti
15	Jumat, 10 Agustus 2018	Merekaptulasi dokumen dan data satker PK BLU	Mas Ari

Catatan:









FAKULTAS EKONOMI tas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285 Laman: www.fe.unj.ac.id

DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN SKS

Nama

: Shafira Nur Imanina Ramadhanti 8335150280

No. Registrasi

: S1 Akuntansi

Program Studi Tempat Praktik

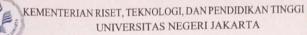
Tempat Praktik : Biro Keuangan Bagian Akuntansi Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Alamat Praktik/Telp : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta Pusat

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Pembimbing	
16	Senin, 13 Agustus 2018	Merekaptulasi data dan dokumen pengkinian BLU BPSDM dan Hubud	Mba Debby	
17	Selasa, 14 Agustus 2018	Membantu memeriksa PSA BP3 Jayapura	Mas Dewa	
18	Rabu, 15 Agustus 2018	Membantu memeriksa PSA BP3 Jayapura	Mas Dewa	
19	Kamis, 16 Agustus 2018	Mempelajari Current Issue dari Bimtek Pengelolaan Keuangan pada Satker di Lingkungan Kemenhub Tahun 2018	Bu Siti	
20	Jum'at,, 17 Agustus 2018	Libur Proklamasi		
21	Senin, 20 Agustus 2018	Mempelajari Penerapan SAP Berbasis Akrual dan Penyesuaian Transaksi akhir periode Laporan (PMK 225/PMK.05/2016)	Bu Siti	
22	Selasa, 21 Agustus 2018	Mempelajari Telaah, Analisis dan interpretasi Laporan Keuangan	Bu Siti	
23	Rabu, 22 Agustus 2018	Libur Idul Adha		
24	Kamis, 23 Agustus 2018	Mempelajari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 220/PMK.05/2016	Mba Debby	
25	Jum'at, 24 Agustus 2018	Mempelajari Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010	Mba Debby	
26	Senin, 27 Agustus 2018	Mempelajari LK Kementerian (022)	Mba Debby	
27	Selasa, 28 Agustus 2018	Mempelajari LK BLU dan LK PSO (Subsidi)	Mba Debby	
28	Rabu, 29 Agustus 2018	Mempelajari proses E-Rekon, telaah, dan SAIBA	Mba Debby	
29	Kamis, 30 Agustus 2018	Membanru memperbaiki PSA BP3 Jayapura berdasarkan hasil Bu Si tindak lanjut pembahasan		
30	Jum'at, 31 Agustus 2018	Membanru memperbaiki PSA BP3 Jayapura berdasarkan hasil tindak lanjut pembahasan	Bu Siti	

Catatan :

Cataun : Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan









FAKULTAS EKONOMI

itas Negeri Jakarta Gedung R., Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon (021) 4721227(4706285, Fax: (021) 4706285 Laman: www.fe.unj.ac.id

DAFTAR KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN SKS

Nama

Shafira Nur Imanina Ramadhanti 8335150280 S1 Akuntansi

No. Registrasi Program Studi

Tempat Praktik

Biro Keuangan Bagian Akuntansi Sekretariat Jenderal Kementerian

Perhubungan
Alamat Praktik/Telp : Jl. Medan Merdeka Barat No. 8. Jakarta Pusat

No	Hari/Tanggal	Keterangan	Pembimbing	
31	Senin, 3 September 2018	Membantu memperbaiki PSA BP3 Jayapura berdasarkan hasil tindak lanjut pembahasan	Mas Dewa	
32	Selasa, 4 September 2018	Membuat nota dinas tindak lanjut pembahasan PSA BP3 Jayapura	Bu Siti	
33	Rabu, 5 September 2018	Mempelajari Proses Bisnis Penyusunan Laporan Keuangan	Bu Siti	
34	Kamis, 6 September 2018	Membuat surat perintah harian (lakhar) bimbingan teknis pengelolaan keuangan	Bu Siti	
35	Jum'at, 7 September 2018	Membantu memeriksa PSA API MADIUN	Pak Gunawan	
36	Senin, 10 September 2018	Membantu memeriksa PSA API MADIUN	Pak Gunawan	
37	Selasa, 11 September 2018	Libur Tahun Baru Hijriyah		
38	Rabu, 12 September 2018	Mempelajari proses penyusunan Laporan Keuangan	Bu Siti	
39	Kamis, 13 September 2018	Mempelajari proses penyusunan Laporan Keuangan	Mba Debby	
40	Jum'at, 14 September 2018	Mempelajari proses E-Rekon sebelum dibuat laporan Keuangan tingkat Kementerian	Mba Debby	
41	Senin, 17 September 2018	Izin (Acara Bantuan Pendidikan di Serang)		
42	Selasa, 18 September 2018	Mempelajari transaksi dalam SAIBA (Purnal Penyewalan Drnalunum) Mas Dew		
43	Rabu, 19 September 2018	Mempelajan proses dalam SAIBA (Posting dan Pengambilan Salda) Mba Debbag		

<u>Catatan</u>: Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



Lampiran 4: Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan







Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285 Laman: www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA LAPANGAN SKS

Nama

: Shafira Nur Imanina Ramadhanti

No. Registrasi

: 8335150280

Program Studi

: S1 Akuntansi

Tempat Praktik

: Biro Keuangan Bagian Akuntansi Sekretariat Jenderal

Kementerian Perhubungan

Alamat Praktik/Telp : Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat/

021-3811308,3505006

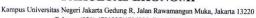
NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin 23 Juli 2018	1	
2.	Seiasa 24 2111 2018	24	
3.	Raby 25 211 2018	3. #	
4.	Kamis 126 Juli 2018	4 1	
5.	Jumat , 27 Juji 2018	5. A	
6.	Senin , 30 Juli 2018	6A	
7.	Selasa 131 Juli 2018	7	
8.	Rabu i 1 Agustus 2018	8	
9.	Kamis, 2 Agustus 2018	9	
10.	Junat 13 Agustus 2018	10	
11.	Senin, 6 Agustus 2018	11	
12.	Selasa 7 Agustus 2018	12	

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

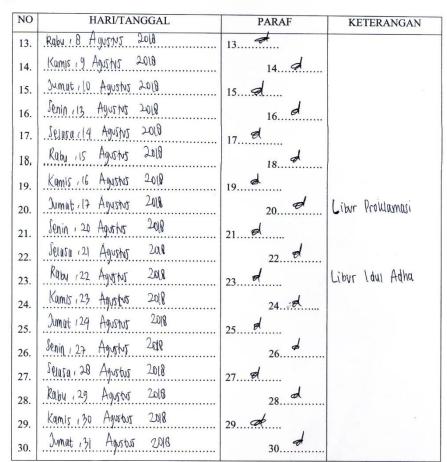








Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285 Laman: www.fe.unj.ac.id



Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERIJAKARTA



FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285 Laman: www.fe.unj.ac.id

	DI CERTIFIED C	

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
31.	Senia 3 September 2018	26	
32.	Selura, 4 September 2018	27. A	
33.	Rabu 15 September 2018	28	
34.	Kanis, 6 September 2018	29	
35.	Jumat, 7 September 2018	30	
36.	Senin, to September 2018	31	
37.	Selara ill September 2018	32	Libur Tahun Baru Hijiriya
38.	Kubu 12 September 2018	33	*
39.	Kamis, 13 September 2018	34	
40.	Jumat 14 September 2018	4	
41.	Senin , 17 September 298	41	12in
42.	felasa 18 September 2018	42.	
43.	Rabu, ig September 2018	43	

Catatan:

Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan Jakarta, Sept 2018

SEKRETARIAT

JENDERAL

JENDERAL

MANUBUNGA

MA

Lampiran 5: Penilaian Praktik Kerja Lapangan



Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220 Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285 Laman: www.fe.unj.ac.id

PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PROGRAM SARJANA (S1) SKS

Nama Shafira Nur Imanina Ramadhanti
No.Registrasi 3335,50280 Sl. Akuntansi Sil Akuntansi Selegaran Studi
Tempal Praktik
Alamat Praktik/Telp 1. Medan Medan Barat No 9 Jaharta Pusat

021-384308,3505026

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 46-100	KETERANGAN 1. Keterangan Penilaian :	
1	Kehadiran	86		
2	Kedisiplinan	87	Skor Nilai Bobot 86-100 A 4	
3	Sikap dan Kepribadian	85	81-85 A- 3,7 76-80 B+ 3,3 71-75 B 3,0	
4	Kemampuan Dasar	87	66-70 B- 2,7 61-65 C+ 2,3	
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	86	56-60 C 2,0 51-55 C- 1,7 46-50 D 1	
6	Kemampuan Membaca Situasi dan	86	2. Alokasi Waktu Praktik :	
	Mengambil Keputusan	01	2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efekti	
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	86	Nilai Rata-rata :	
8	Aktivitas dan Kreativitas	88	865 = 865	
9	Kēcepatan Waktu Penyelesaian Tugas	88	10 (sepuluh)	
10	Hasil Pekerjaan	86	Nilai Akhir :	
			87 A	
			Angka bulat huruf	
	Jumlah			

Catatan : Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaar



Lampiran 6: Surat keterangan Praktik Kerja Lapangan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8 | TELP. : (021) 3811308, 3505006 | TLX : 46116 Menhub IA email : puspatin@dephub.go.id home page : www.dephub.go.id

SURAT KETERANGAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Nomor: 131/11/8.11/9/2018

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

: Siti Aluyah, SE.Ak.CA.M.Ak

Jabatan

: Kepala Subbagian Akuntansi Transportasi Udara dan Penunjang

Alamat

: Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110

Dengan ini menerangkan bahwa:

: Shafira Nur Imanina Ramadhanti

Asal Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta

Nomor Register

: 8335150280

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan di Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Praktek Kerja Lapangan telah dilaksanakan selama 40 hari atau kurang lebih 2 (dua) bulan, yaitu mulai tanggal 23 Juli 2018 s/d 19 September 2018.

Selama Pelaksanaan Praktek kerja Lapangan di Kementerian Perhubungan, yang bersangkutan telah mempelajari tentang proses penyusunan dan pelaporan keuangan serta proses bisnis dan penatausahaan di Bagian Akuntansi Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan. Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Demikian surat keterangan Praktek Kerja Lapangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, September 2018

A.n. Kepala Bagian Akuntansi

Kepala Subbagian Akuntansi Transportasi Udara dan Penunjang

0507 200912 2 001

"Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi"

Lampiran 7: Lambang dan Logo Kementerian Perhubungan



Sumber : dephub.go.id

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Bidang Teknologi, Lingkangan dan
Energi Perhubungan
2. Bidang Habum dan Reformasi Birokrasi
S. Bidang Logistik, Multimoda dan
Kesienatan Perhubungan, dan
Kemitran Perhubungan

DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN

PERHUBUNGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN

PERHUBUNGAN

PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL

PERHUBUNGAN

REBURUNGAN

PERHUBUNGAN

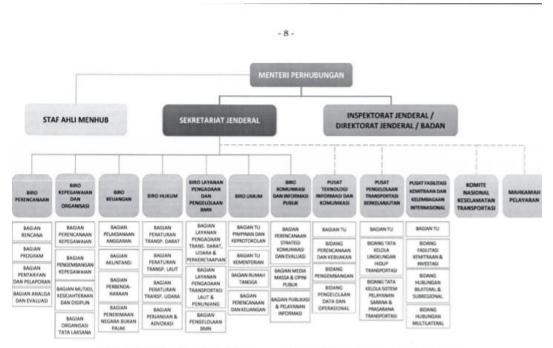
PERHUBUN

Lampiran 8: Struktur Organisasi Kementerian Perhubungan

Sumber: www.dephub.go.id

Lampiran 9: Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian

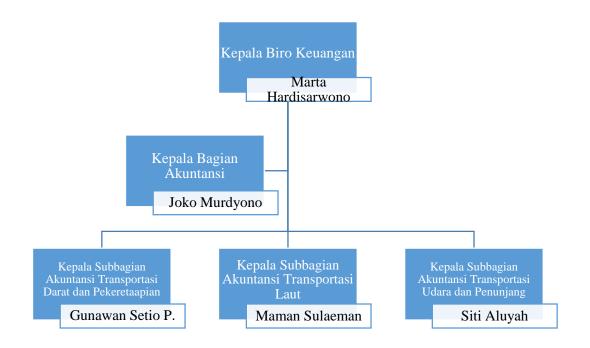
Perhubungan



Gambar 1 Struktur Organisasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan

Sumber: www.dephub.go.id

Lampiran 10: Struktur Organisasi Biro Keuangan Bagian Akuntansi



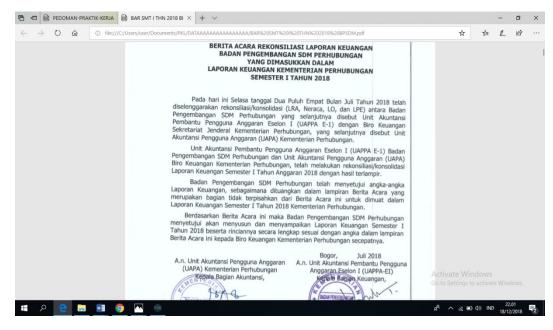
Sumber: Data diolah oleh Praktikan

Lampiran 11: Aplikasi eRekon-LK



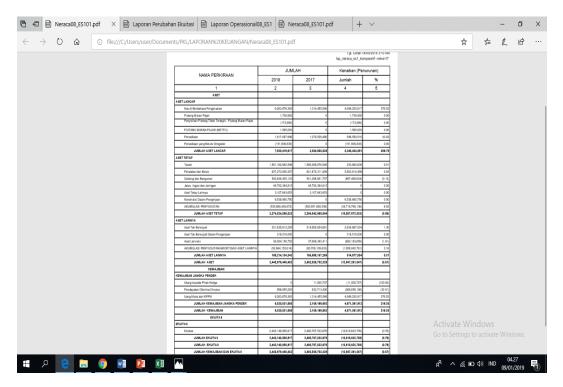


Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK)

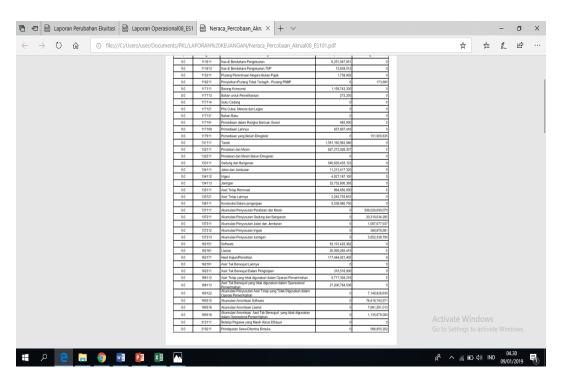


Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan

Lampiran 12 : Laporan Keuangan

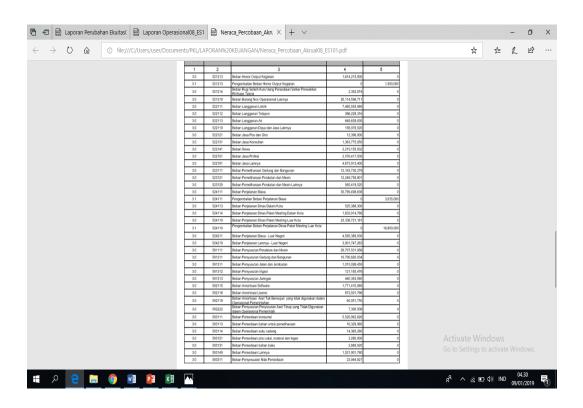


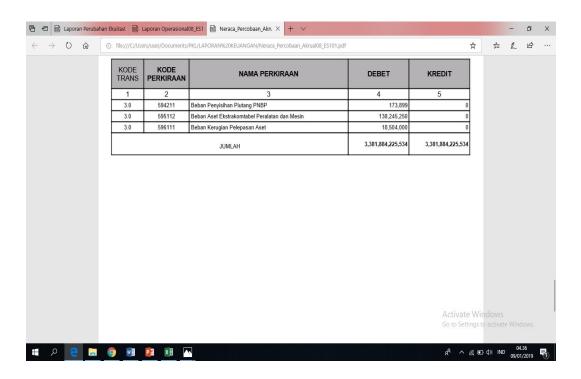
Neraca

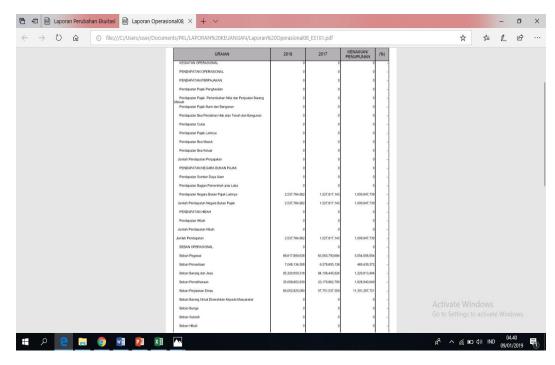


Neraca Percobaan Akrual

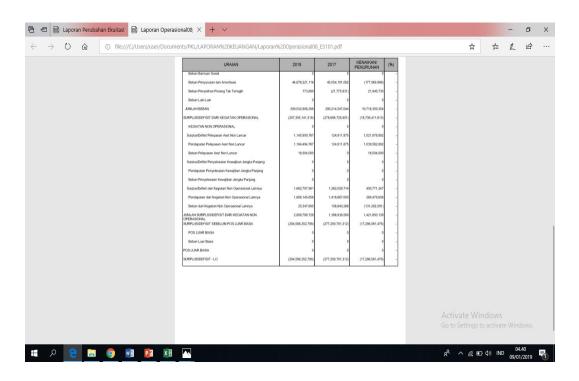
0	0 0 4,410,105,174 0 0	6,263,676,363 276,825,201,254 0 95,953,396			
60 313121	0 4,410,105,174 0 0	0 95,953,366			
9.0 31927 Tunneth Massa 9.0 591111 Sulfer Massa 9.0 591114 Revolution Aster Force 9.0 591114 Revolution Aster Force 9.0 591114 Revolution Aster Force 9.0 591114 Revolution (See Trans) Coloring Into Revolution 3.0 421914 Revolution Force Trans) Coloring Into Revolution 3.0 421914 Revolution Force Trans) Coloring from Revolution 3.0 421914 Revolution Force Trans) Coloring from Revolution 3.0 421914 Revolution Conference Trans) Coloring Force Transit Coloring (See Transit Coloring	4,410,105,174 0 0				
0.0 201111 Souther	0				
9.0 391114 Revoluted Ares Tenja	0				
0	0	2,460,767,532,676			
3 d 43141 Profession Sear Tank, Oslang die Bergune 3 d 42365 Provensian Kestral Belasy Papasar (SAN Angger Ang Like 3 d 42365) Profession Sear Profession Sear Profession (SAN Angger Ang Like		3,226,142,583			
3.0 42951 Peneriman Kerbali Belaya Pegawai Tahun Angaran Yang Lalu 3.0 425129 Pendapatan dan Penendahtanganan BMN Lalanya	0	230,537,000			
3.0 425129 Pendagatan dari Pemindahtanganan BMN Lahtnya	0	70,000			
	0	3,267,012			
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,164,494,767			
	0	1,180,498,146			
3.0 425959 Pendapatan Jana Lahnya	0	1,357,035,796			
3.0 425911 Penerimaan Kembali Bolanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	35,495,046			
3.0 425912 Penerimaan Kembali Belanja Banang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	432,938,722			
3.0 425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pansiunan PNS	0	504.741.935			
3.0 425959 Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	160.940			
3.0 491429 Pendapatan Pendapatan Pendapatan Aset Lainnya	0	476,179,700			
3.0 491511 Pendagatan Penyaguaian Nilai Persadaan	0	235.523.241			
	25.281.191.300	0			
3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS	358,712	0			
3.1 511119 Pengembalan Beban Pembulanan Gaji PNS	0	2,265			
3.0 511121 Beben Turrj, Suamiriteti PNS	1,915,155,890	0			
3.0 511122 Beban Tunj, Anak PNS	504,605,808	0			
3.0 511123 Beban Tunj, Struktural PNS	1,659,680,000	0			
3.0 511124 Beban Tury, Fungsional PNS	1,039,080,000	0			
3.1 511124 Pengembalian Beban Tuni, Fungsional PNS	0	2,440,500			
3.0 511125 Beben Tunj. PPh PNS	128,790,337	0			
3.0 511126 Beben Tunj. Beras PNS	1,250,798,020	0			
	2,496,178,000	0			
3.0 511151 Beban Tunjangin Unxun PNS	910,330,000	0			
3.1 511151 Pengembalan Beban Tunjangan Uhuan PNS	0	2,210,000			
3.0 512211 Beban Uang Lembur	338,270,000	0			
	33,105,375,336	0			
3.1 612411 Plengembalian Beban Pogawai (Tunjangan Khasun' Kogistan)	0	7,271,000			
	26,967,530,025	0			
3.0 521113 Beban Penarribah Daya Tahan Tutuh	387,972,750	0			
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	152,734,966	0			
	4,293,379,850 8,269,605,012	0			
	8,269,605,012 3,888,120,217	0	Go to Settings to		

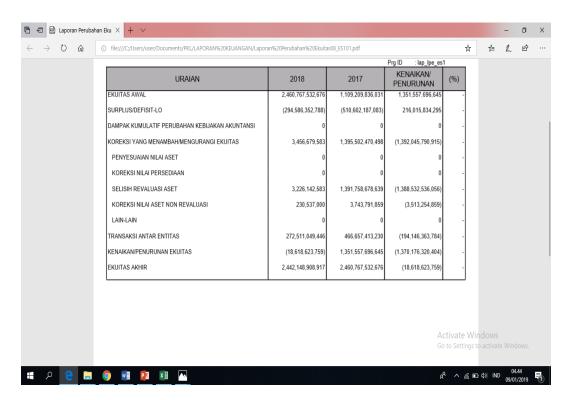




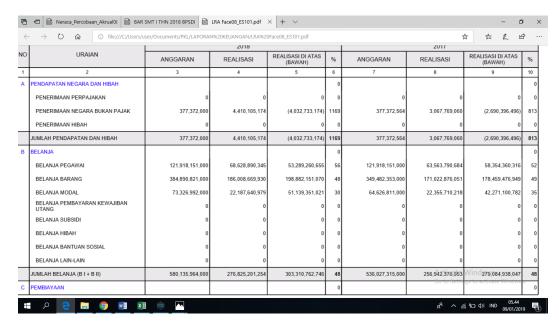


Laporan Operasional



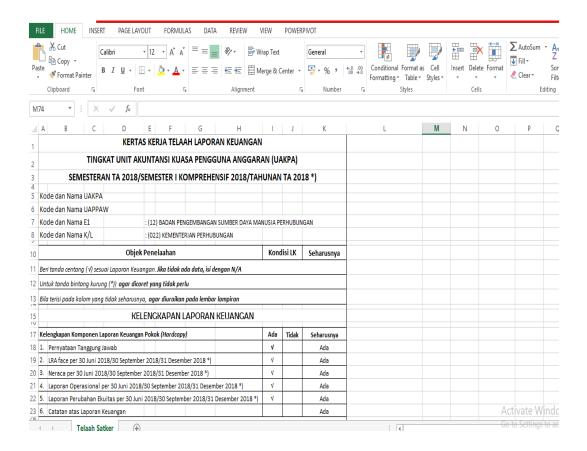


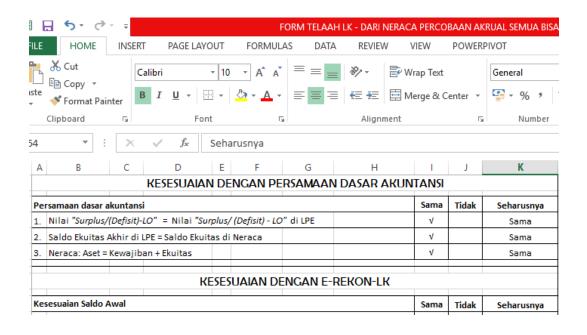
Laporan Perubahan Ekuitas

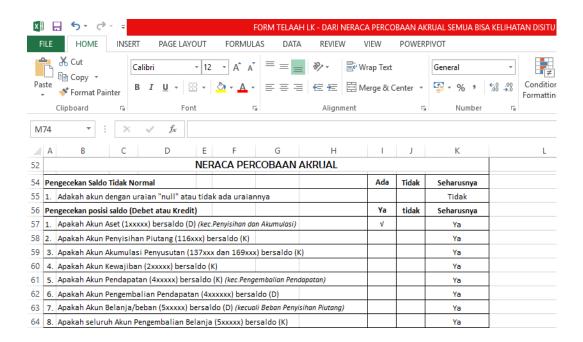


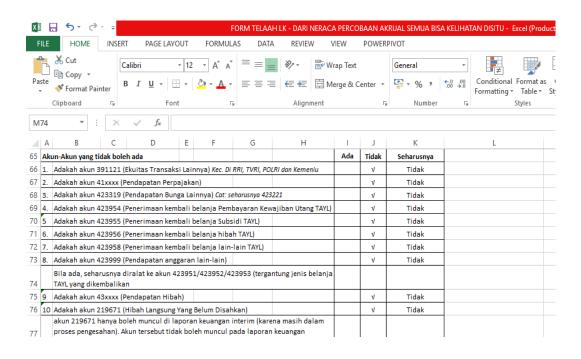
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

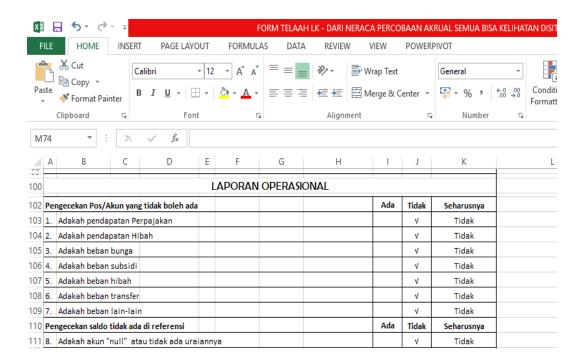
Lampiran 13: Form Telaah Laporan Keuangan

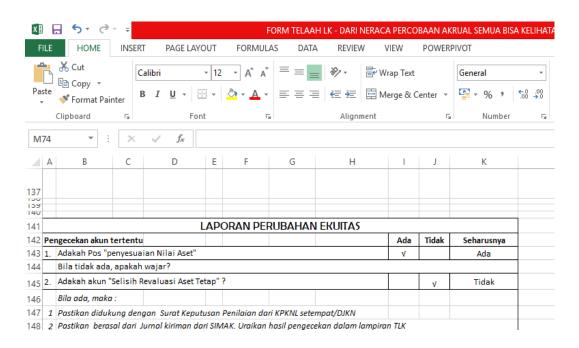


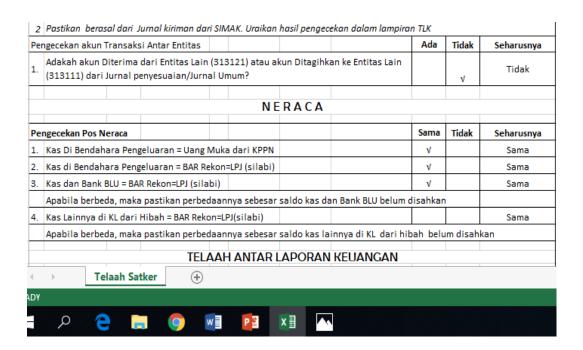


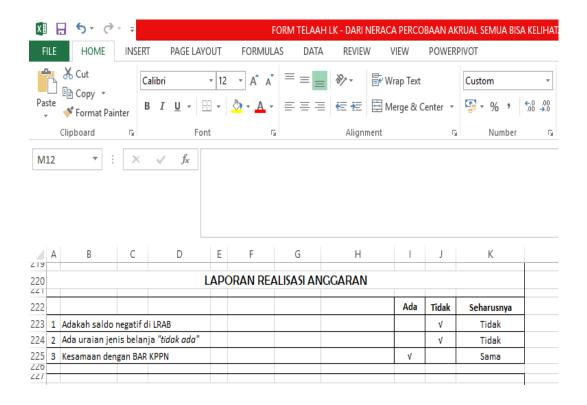






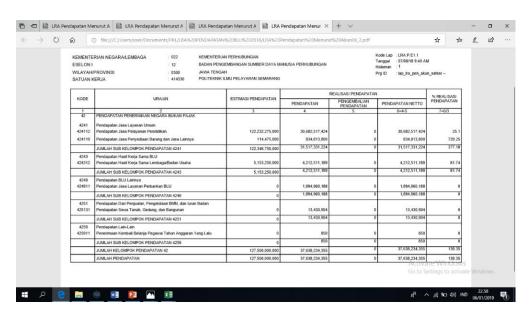




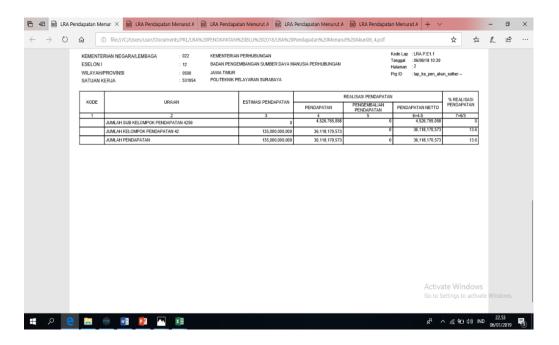


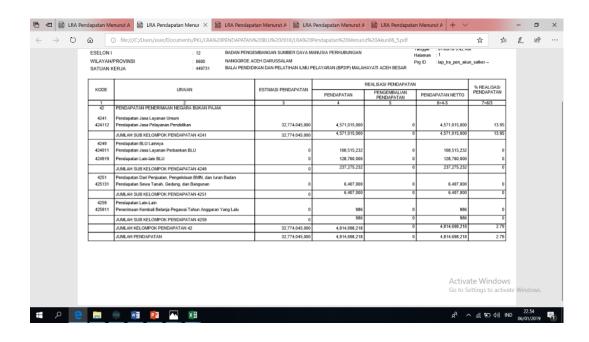
Lampiran 14: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan



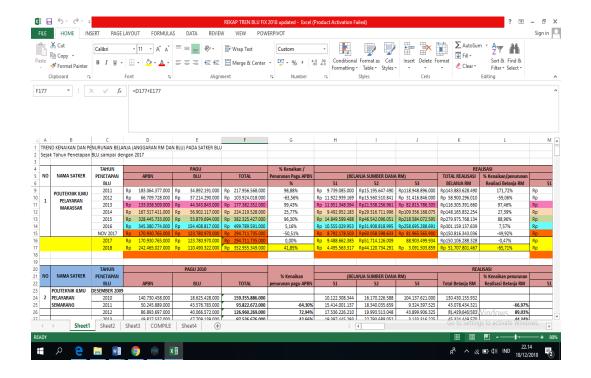


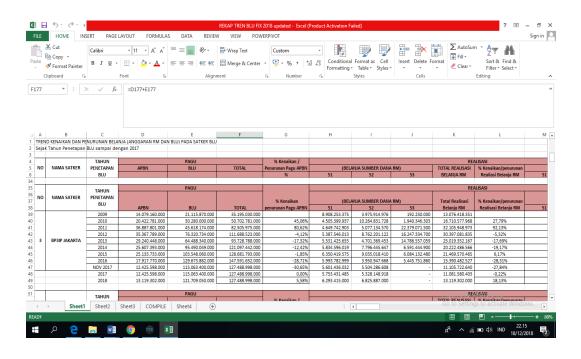
KEMENTE ESELON I WILAYAH/ SATUAN K	: 12 BADAN PENG PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA	N PERHUBUNGAN IEMBANGAN SUMBER DAYA M PENDIDIKAN PENYEGARAN D		T F	iode Lap : LRA.P.E1.1 (anggal : 06/08/18 10:38 (alaman : 1 (alaman : 1)	in_satker		
KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN		REALISASI PENDAPATAN		% REALISASI		
KODE	Oromes	LSTINASI PENEMPATAN	PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	PENDAPATAN		
42	2 PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	3	4	5	6=4-5	7=6/3		
4241 424112	Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	121,709,050,000	27,211,140,999	0	27,211,140,999	22.36		
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	121,709,050,000	27,211,140,999	0	27,211,140,999	22.36		
4243 424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	275,900,000	0	275,900,000	0		
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	0	275,900,000	0	275,900,000	0		
4249 424911	Pendapatan BLU Lainnya Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	2,605,464,081	0	2,605,464,081	0		
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang	0	11,213,340	0	11,213,340	0		
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	0	2,616,677,421	0	2,616,677,421	0		
4251 425129	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan luran Badan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	32,400,099	0	32,400,099	0		
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	636,286	0	636,286	0		
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	33,036,385	0	33,036,385			
4259 425911	Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	373	0	373	0		
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	373	0	373	0		
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	121,709,050,000	30,136,755,178	0	30,136,755,178	3.19		
	JUMLAH PENDAPATAN	121,709,050,000	30,136,755,178	0	30,136,755,178	ite Wind		

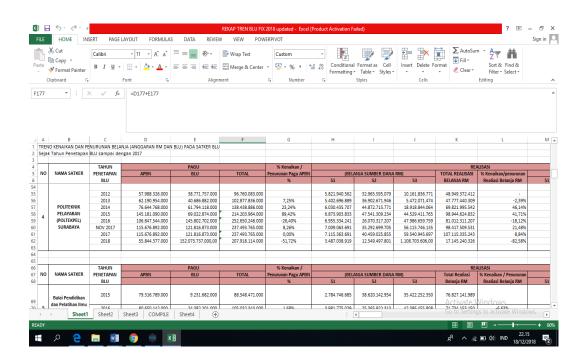


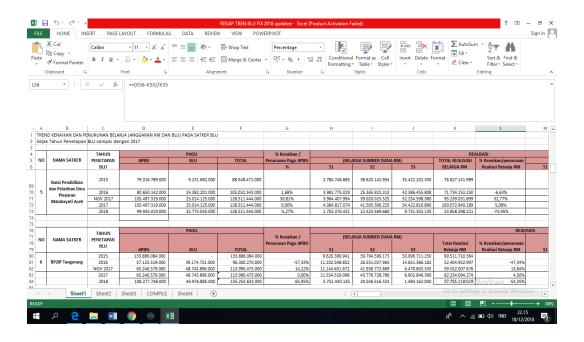


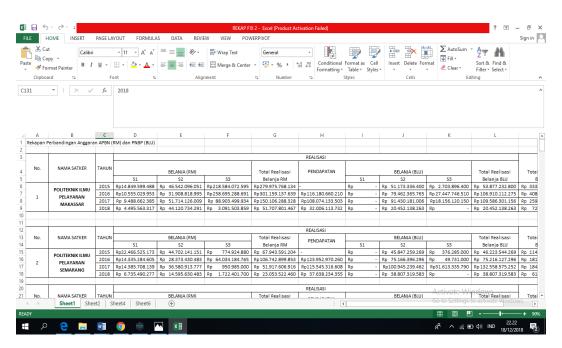
Lampiran 15: Form Excel Trend Kenaikan dan Penurunan Belanja (Anggaran RM DAN BLU) pada satker BLU



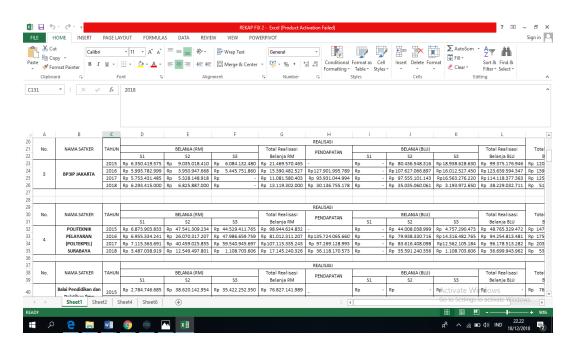


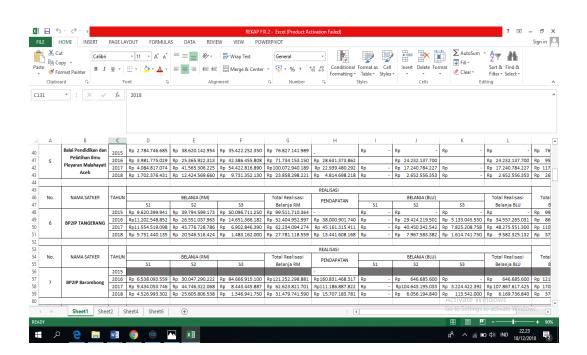


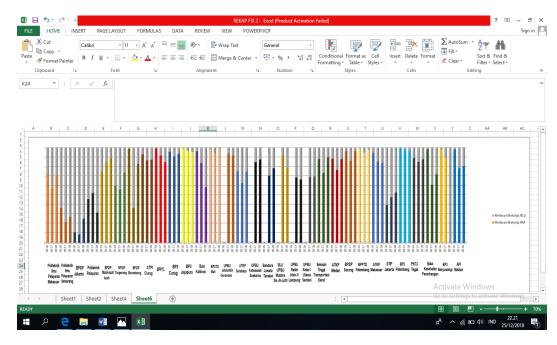




Realisasi Belanja RM,Pendapatan dan Belanja BLU

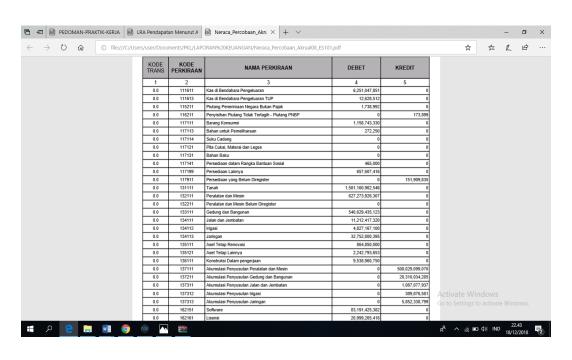


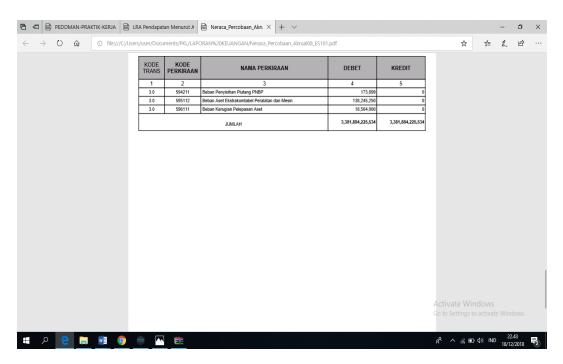


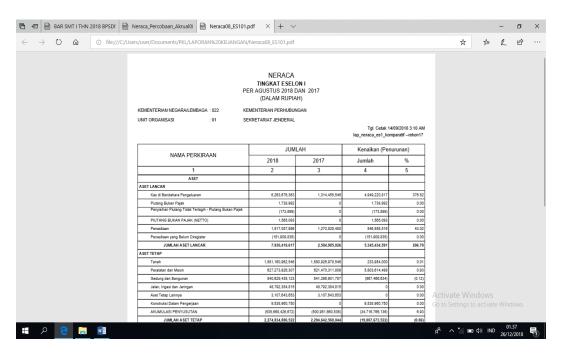


Grafik Perbandingan Anggaran APBN (RM) dan PNBP (BLU)

Lampiran 16: Neraca Percobaan Akrual



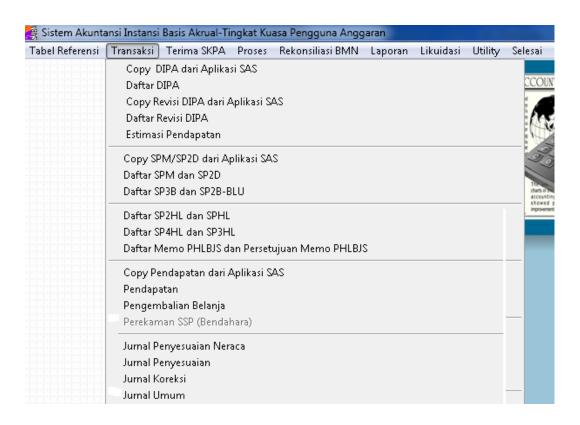


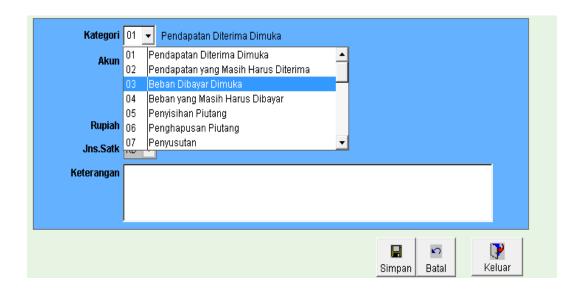


Neraca

Lampiran 17: Transaksi Jurnal Penyesuaian



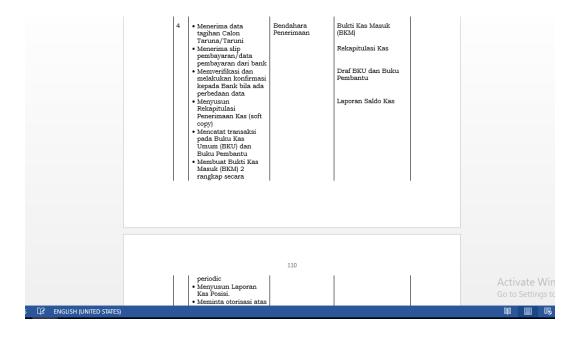


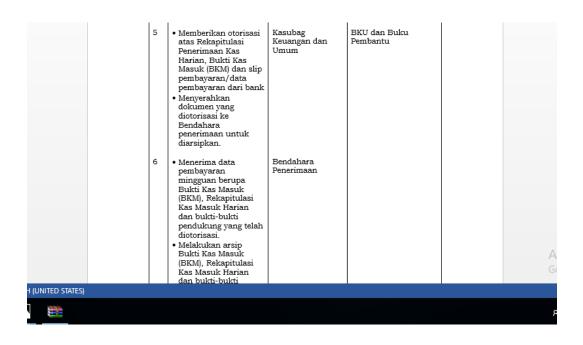




Lampiran 18 : Prosedur Akuntansi Sub Sistem Akuntansi Pendapatan Jasa BP3Jayapura

a NO	Pendidikan dan Pelatii) Prosedur Pendapatan Pelatihan AKTIVITAS	n Jasa Layanan PENANGGUNG	Pendidikan dan	
1	Memberikan data calon taruna/ taruni Kepada Bendahara Penerimaan.	JAWAB Divisi Pengembangan Usaha	Data Penetapan	
2	Calon Taruna / Taruni membayar tagihan ke bank dan menerima bukti setoran.	Calon Taruna/ Taruni	Slip Setoran Bank	
	Menerima pembayaran atau transfer <u>dana</u> dari Calon Taruna/Taruni.	Bank Persepsi (Rekenig Operasional Khusus Penerimaan untuk yang final dan Rek dana Kelolaan untuk yang belum final)	Slip Setoran Bank	
4	Menerima data tagihan Calon Taruna/Taruni	Bendahara Penerimaan	Bukti Kas Masuk (BKM) Rekapitulasi Kas	A 1° 1 AAA
	Menerima slip pembayaran/data pembayaran dari bank Memverifikasi dan		Draf BKU dan Buku	Activate W Go to Settings





Menerima data pembayaran mingguan berupa Bukti Kas Masuk (BKM), Rekapitulasi Kas Masuk Harian dan bukti-bukti pendukung yang telah diotorisasi. Melakukan arsip Bukti Kas Masuk (BKM), Rekapitulasi Kas Masuk Harian dan bukti-bukti pendukung yang telah diotorisasi. Dalam hal, Calon Taruna/taruni telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Divisi Pengembangan Usaha membuat Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Pendidikan dan	Bendahara Penerimaan Divisi Pengembangan Usaha	SK Penetapan	

pelatihan telah diberikan. SK tersebut disampaikan Kepada Bendahara Penerimaan.			
8 • Berdasarkan SK Penetapan tersebut, dibuat draft cheque dan draft memo pemindahbukuan kas dari Rek. Dana kelolaan ke Rekening Operasional Khusus Penerimaan. • Menyampaikan draft cheque dan draft memo pemindahbukuan kepada Kasubag, Keuangan dan Umum.	Bendahara Penerimaan	Draft cheque Draft Memo Pemindah bukuan Kas	
9 • Menerima draft cheque dan draft memo pemindahbukuan dari Bendahara Penerimaan. • Melakukan verifikasi atas draft tersebut dan memberikan persetujuan dengan memaraf draft tersebut. • Dalam hal terdapat kekurangjengkapan atau kekeliruan maka draft tersebut dikembalikan ke	Kasubag Keuangan dan Umum		Activate Wind Go to Settings to a

9	Menerima draft cheque dan draft memo pemindahbukuan dari Bendahara Penerimaan. Melakukan verifikasi atas draft tersebut dan memberikan persetujuan dengan memaraf draft tersebut. Dalam hal terdapat kekurangjengkapan atau kekeliruan maka draft tersebut dikembalikan ke Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki/ dilengkapi. Menyerahkan draft cheque dan draft memo kepada Kepala Balai untuk mendapat persetujuan. Menerima draft cheque dan draft memo kepada Kepala Balai untuk mendapat persetujuan. Menerima draft cheque dan draft memo kepada Kepala penala Balai untuk mendapat persetujuan.	Kasubag Keuangan dan Umum	Cheque	
				Activate W Go to Settings

	atas dan pers men terse • Dala keku atau draff dike: Kasu dan dipe: • Men dan Ben	im. skukan verifikasi draft tersebut memberikan etujuan dengan andatangani draft ebut. im hal terdapat tranglengkapan t kekeliruan maka t tersebut mbalikan ke tabag. Keuangan Umum untuk rbaiki/ dilengkapi. yerahkan cheque memo kepada dahara erimaan.		Memo Pemindahbukuan Kas	
os Q8 English (United States)	mem pem Kepz Mels pem Lapc dari Kelo Oper Pene Men pada Umu Buk Mem Mass	erima cheque dan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Bendahara Penerimaan	BKU dan Buku Pembantu Laporan Saldo Kas	Activate Winc Go to Settings to a

Lampiran 19: Prosedur Pendapatan Jasa Layanan dan Pendidikan

					Pelak	sana				Mutu Baku	
No	Uraian Jenis Kegiatan	Divisi Pengembangan Usaha	Bendahara Penerima	Calon Taruna/Tarun i	Bank Persepsi	Kasubag Keuangan dan Umum	Kepala Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memberikan data calon taruna/taruni Kepada Bendahara Penerima.		•					Data Penetapan Calon Taruna/Taruni	5 menit	Data Penetapan	
2.	Calon Taruna/Taruni membayar tagihan ke Bank dan menerima bukti setoran.				- -			Slip Setoran Bank	15 Menit	Slip Setoran Bank	
3.	Menerima pembayaran atau transfer dana dari Calon Taruna/Taruni				Ť			Slip Setoran Bank	5 Menit	Slip Setoran Bank	
4.	Menerima data tagihan Calon Taruna/Taruni Menerima slip							Bukti Kas Masuk (BKM) Rekapitulasi Kas		Bukti Kas Masuk (BKM) Rekapitul	
	pembayaran/data pembayaran dari bank			1				Draf BKU dan Buku Pembantu Laporan	15 Menit	asi Kas • Draf BKU dan Bula	
ï	Memverifikasi dan melakukan konfirmasi kepada Bank bila ada perbedaan data			Tidak				Saldo Kas		Pembant u	

	Menyusun Rekapitulasi Penerimaan Kas (soft copy)				Rekapitulasi Kas	5 menit	Rekapitulasi Kas	
	Mencatat transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu	Ţ.			Buku Kas Umum dan Pembantu	5 menit	Euku Kas Umum dan Pembantu	
	Membuat Bukti Kas Masuk (BKM) 2 rangkap secara periodik	T T			Buku Kas Masuk (BKM)	5 menit	Buku Kas Masuk (BKM)	
	Menyusun Laporan Kas Posisi	Ť			Laporan Posisi Kas	5 menit	Laporan Posisi Kas	
	Meminta otorisasi atas Rekapitulasi Penerimaan Kas Harian, BKM dilampiri dengan slip pembayaran/data pembayaran dari bank (mingguan)				Bukti Kas Masuk (BKM) Rekapitulasi Kas Draf BKU dan Buku Pembantu Laporan Saldo Kas	5 Menit	BKM, BKU, Laporan Kas yang telah diotorisasi	
5.	Memberikan otorisasi atas Rekapitulasi Penerimaan Kas Harian, Bukti Kas Masuk (BKM) dan slip pembayaran/data pembayaran dari bank				BKM, BKU, Laporan Kas yang telah diotorisasi	5 menit	BKM, BKU, Laporan Kas yang telah diotorisasi	

	Menyerahkan dokumen yang diotorisasi ke Bendahara penerimaan untuk diarsipkan.				BKM, BKU, Laporan Kas yang telah diotorisasi	5 menit	BKM, BKU, Laporan Kas yang telah diotorisasi
6.	Menerima data pembayaran mingguan berupa Bukti Kas Masuk (BKM), Rekapitulasi Kas Masuk Harian dan bukti-bukti pendukung yang telah diotorisasi.		†		Bukti Kas Masuk (BKM) Rekapitulasi Kas Draf BKU dan Buku	5	Bukti Kas Masuk (BKM) Rekapitul asi Kas Draf BKU
	Melakukan arsip Bukti Kas Masuk (BKM), Rekapitulasi Kas Masuk Harian dan bukti-bukti pendukung yang telah diotorisasi.		†		Pembantu Laporan Saldo Kas Yang telah diotorisasi	menit	dan Buku Pembant u • Laporan Saldo Kas
7.	Dalam hal, Calon Taruna/taruni telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, Divisi Pengembangan Usaha membuat Surat Keputusan yang menyatakan bahwa Pendidkan dan pelatihan telah diberikan. SK tersebut disampaikan Kepada Bendahara Penerimaan.	7	—		SK Penetapan	5 menit	SK Penetapan

8.	Berdasarkan SK Penetapan tersebut, dibuat draft cheque dan draft memo pemindahbukuan kas dari Rek. Dana kelolaan ke Rekening Operasional Khusus Penerimaan.			Draf cheque Draf Memo Penindahbuku	15 menit	Draf cheque Draf Memo Pemindah
	Menyampaikan draft <i>cheque</i> dan draft memo pemindahbukuan kepada Kasubag. Keuangan dan Umum.		-	an Kas	meint	bukuan Kas
9.	Menerima draft cheque dan draft memo pemindahbukuan dari Bendahara Penerimaan.					
	Melakukan verifikasi atas draft tersebut dan memberikan persetujuan dengan memaraf draft tersebut.			Draf cheque Draf Memo Pemindahbuku an Kas	15 menit	Draf cheque Draf Memo Pemindah bukuan Kas
	Dalam hal terdapat kekuranglengkapan atau kekeliruan maka draft tersebut dikembalikan ke Bendahara Penerimaan untuk diperbaiki/ dilengkapi.		Tidak			Yang telah diparaf

	Menyerahkan draft <i>cheque</i> dan draft memo kepada Kepala Balai untuk mendapat persetujuan.]]—	•				
10.	Menerima draft <i>cheque</i> dan draft memo pemindahbukuan dari Kasub. Keuangan dan Umum.					†				
	Melakukan verifikasi atas draft tersebut dan memberikan persetujuan dengan menandatangani draft tersebut.						Cheque		Cheque	
	Dalam hal terdapat kekuranglengkapan atau kekeliruan maka draft tersebut dikembalikan ke Kasubag. Keuangan dan Umum untuk diperbaiki/ dilengkapi.			Tida	ık	\(\)	Memo Pemindahbuku an Kas	15 menit	Memo Pemindah bukuan Kas	
	Menyerahkan <i>cheque</i> dan memo kepada Bendahara Penerimaan.									

11.	Menerima <i>cheque</i> dan memo pemindahbukuan dari Kepala Balai.							
	Melakukan pemindahbukuan Laporan Saldo Kas dari Rek. Dana Kelolaan ke Rek. Operasional Khusus Penerimaan.				BKU dan Buku Pembantu dan Laporan Saldo Kas	15 menit		
	Mencatat transaksi pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu				Lapuran Saluv Nas		Pembantu dan	
	Membuat Bukti Kas Masuk (BKM) dan Bukti Kas Keluar atas pemindahan kas tersebut.							

Lampiran 20: Surat Perbaikan atas Dokumen Usulan Pedoman Sistem

Akuntansi BP3 Jayapura



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BADANPENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN BALAI PENDIDIKANDAN PELATIHAN PENERBANGAN JAYAPURA

Jln. KayuBatu No. 6 TanjungRia

Telepon: (0967) 541049 Fax: (0967) 541562

Email : info@cac-jayapura.ac.id Website : www. cac-jayapura.ac.id

Jayapura, 20 Agustus 2018

Nomor Klasifikasi Lampiran

: KU.303 / 1 / 4 /BL.DIK - 2018

Segera 1 (satu) Set

Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Usulan Pedoman Sistem Akuntansi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura

Kepada

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Yth. Kementerian Perhubungan

JAKARTA

- 1. Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: KU.202/49/13 Phb.2018 tanggal 8 Agustus 2018 Perihal: Tindak Lanjut Hasil Rapat Pembahasan Usulan Pedoman Sistem Akuntansi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura bahwa Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura diminta melakukan perbaikan dan koreksi atas Dokumen Usulan Pedoman Sistem Akuntansi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura;
- Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut, bersama ini disampaikan perbaikan dan koreksi atas Dokumen Usulan Pedoman Sistem Akuntansi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura (perbaikan dan koreksi Dokumen Usulan PSA terlampir);
- 3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan

KERANABALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEREBANGAN JAYAPURA

GENNY BUUNG PRASOJO, SS, MM

AMGAN SUNGES
Pembina (IV/a)

GAN SUMBER 19770425 200012 1 002

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengembangan SDM
Perhubungan

2. Kepala Pusat Pengembangan SDM
Perhubungan Udara



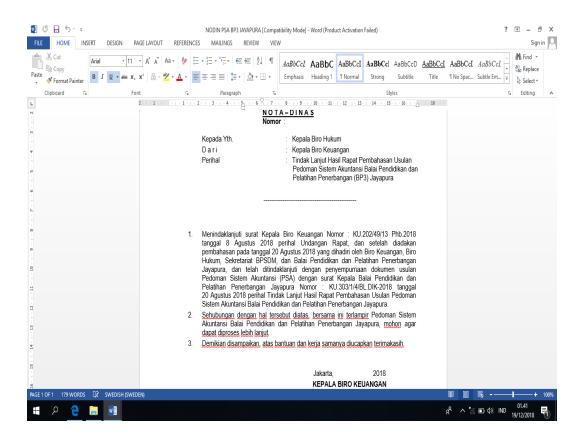








Lampiran 21: Nota Dinas Pembahasan Pedoman Sistem Akuntansi



Lampiran 22: Kartu Konsultasi Bimbingan

Catatan : 1. Kartu ini dibawa dan dita 2. Kartu ini dibawa pada sa				21 Desember 2018	14 Desember 2018	30 November 2018	Store Josephon 61	13 Navember 2018	B Nevember 2018	2 November 2018	TGLBLNTHN	Nama Mahasiswa No.Registrasi Program Studi Dosen Pembimbing	
l atatan : Kariu ini dihawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi Kariu ini dihawa pada saat ujian PKL. apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan			6	Konvitusi BAB IV	Revin 15AB III	Konsultari BAB III	REVISI BAB U	Kongvitan 15AB II	Revisi BAB I	Konsultari BAB I	MATERI KONSULTASI	Shafra Nur Im 875/5/5028 81 AKINTANI Tr. Helb Utamini Tr. Helb Utamini 19760/19728	A IKIA
SETUJU UNTUK UJIAN PKL					UNITON	Missor tahapan lunja dibatpain & bultana, kemulan atawalay.		i structor o	0	Perbajui Latar Belauaru	SARAN PEMBIMBING TANDA TANGAN	KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL anina Ramudhanti s. Judul PKL Laparan ligikak Kerja Lapangan pada ben Keyangan benjan Akuntani sewerangi Senderal Bin Keyangan benjan Akuntani sewerangi Senderal Kenenteran Penjudnyan	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA FAKULTAS EKONOMI Kampan Universitas Negeri Jaharta Godung R. Jahan Reparatagan Musik, Jaharta 13220 Telepon (ICI) 4772127/14706285, Fac. (ICI) 4706385